

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN
ANAK TIDAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh pendidikan yang layak sehingga perlu dilakukan penanganan secara intensif melalui rencana aksi penanganan anak tidak sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
- c. bahwa di Kabupaten Kubu Raya telah disusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah sebagai wujud komitmen Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah dan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah serta mitra pembangunan dalam implementasinya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara dan/atau hak tradisional.
8. Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat RAD-PATS adalah dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029 yang memuat kebijakan, strategi, kegiatan dan anggaran daerah yang menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam rangka Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Pasal 2

RAD-PATS yang merupakan pengembangan dari strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah, bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman resmi dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program-program penanganan anak tidak sekolah serta memastikan intervensi yang dilakukan lebih terarah, sistematis dan sesuai kebutuhan Daerah;
- b. diadopsi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah; dan
- c. memastikan agar setiap anak di Daerah memperoleh layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kehidupan mereka.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Peserta RAD-PATS meliputi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang:
 - a. belum pernah bersekolah;
 - b. *Drop Out*; dan
 - c. lulus tetapi tidak melanjutkan.
2. Kelompok prioritas penanganan anak tidak sekolah meliputi:
 - a. anak yang berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal;
 - b. anak yang bekerja dan pekerja anak;
 - c. anak penyandang disabilitas;
 - d. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. anak jalanan dan anak terlantar;
 - f. anak dalam pernikahan anak/ibu remaja; dan
 - g. kelompok anak tidak sekolah lainnya.

BAB II PENYELENGGARAAN RAD PATS

Pasal 4

- (1) RAD-PATS diselenggarakan pada jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sekolah dasar;
 - b. madrasah ibtidaiyah;
 - c. sekolah menengah pertama; dan
 - d. madrasah tsanawiyah;
- (3) RAD-PATS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan melalui program paket A dan paket B, atau bentuk lain sederajat
- (4) RAD-PATS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati melalui perangkat daerah dapat melakukan koordinasi terkait RAD-PATS penyelenggaraan jalur pendidikan formal dan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan RAD-PATS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan RAD-PATS yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan anak tidak sekolah mendapat tempat

pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan dimana anak akan bersekolah.

- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan kecamatan dan desa untuk memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menerapkan praktik baik dalam bentuk inovasi untuk memastikan Anak Tidak Sekolah dapat kembali bersekolah.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PATS menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tanggung jawab pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (3) Bupati dalam melakukan pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim kerja.
- (4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Perangkat Daerah yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh sekretariat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

BAB IV DOKUMEN

Pasal 7

- (1) RAD-PATS merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029 yang memuat kebijakan, strategi, kegiatan dan anggaran daerah yang menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam rangka Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
- (2) Dokumen RAD-PATS terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kondisi Umum Pendidikan;
 - c. BAB III Analisis Situasi Anak Tidak Sekolah;
 - d. BAB IV Rencana Aksi Daerah; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (4) Dokumen RAD-PATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PATS .
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-PATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun, yaitu pada setiap akhir tahun.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. tingkat pencapaian pendidikan;
 - b. peserta pendidikan;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi pelaksanaan RAD-PATS dapat melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Desa.

BAB VI JAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin keberlangsungan pelaksanaan RAD-PATS minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Setiap orang/tua wali peserta didik wajib meyekolahkan anaknya dan/atau anak walinya sampai lulus pendidikan menengah pertama.
- (3) Peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai persyaratan dapat diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau lembaga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan RAD-PATS.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. bantuan beasiswa;
 - b. bantuan kebutuhan peserta didik;
 - c. bantuan fasilitas pembelajaran; dan/atau
 - d. pengawasan peserta didik di luar lingkungan sekolah pada jam belajar.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf c, disalurkan melalui :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan.
- (4) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (5) Satuan pendidikan yang memfasilitasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kepada Bupati.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara berkala paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada setiap akhir tahun.
- (7) Pengawasan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yakni:
 - a. melaporkan kepada satuan pendidikan; dan/atau
 - b. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PATS.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Sekretariat RAD-PATS melalui Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PATS kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada setiap akhir tahun.

BAB X PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk pelaksanaan RAD-PATS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...

1



**BAPPEDALITBANG
KABUPATEN KUBU RAYA**

RAD P-ATS



**RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN
ANAK TIDAK SEKOLAH**

**KABUPATEN KUBU RAYA
2020-2024**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU
RAYA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENANGANAN ANAK TIDAK
SEKOLAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD P-ATS) Kabupaten Kubu Raya ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat anak-anak di Kabupaten Kubu Raya yang belum memperoleh kesempatan pendidikan secara layak, baik karena faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun keterbatasan akses. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bersama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.

RAD P-ATS Kabupaten Kubu Raya hadir sebagai pedoman strategis dalam merumuskan langkah-langkah komprehensif, terarah, dan kolaboratif antara pemerintah daerah, perangkat desa, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi dasar perencanaan program, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan intervensi agar setiap anak dapat memperoleh haknya atas pendidikan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RAD P-ATS ini, mulai dari proses pengumpulan data, analisis, hingga perumusan rencana aksi. Tanpa dukungan lintas sektor, dokumen ini tidak mungkin tersusun secara komprehensif.

Akhirnya, kami berharap dokumen ini dapat menjadi pijakan bersama dalam upaya mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang bebas dari Anak Tidak Sekolah,

serta melahirkan generasi muda yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa.

Kubu Raya, Oktober 2025

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI.....	11
DAFTAR TABEL.....	13
DAFTAR GAMBAR	14
BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.1 Latar Belakang.....	15
1.2 Landasan Hukum.....	18
1.2 Maksud dan Tujuan	20
1.3 Sistematika	20
BAB II KONDISI UMUM PENDIDIKAN	21
2.2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).....	21
2.3 Harapan Lama Sekolah (HLS)	22
2.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	23
2.4.1 APS Usia 7–12 Tahun (Setara Sekolah Dasar)	24
2.4.2 APS Usia 13-15 Tahun (Setara Sekolah Menengah Pertama)	25
2.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	27
2.6 Kondisi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Kubu Raya	28
BAB III ANALISIS SITUASI ANAK TIDAK SEKOLAH	31
3.1 Kelompok Anak Tidak Sekolah Prioritas	31
3.2 Identifikasi Kelompok ATS berdasarkan Sebaran Wilayah	33
1. ATS Kecamatan Sungai Ambawang	36
2. ATS Kecamatan Kuala Mandor B.....	37
3. ATS Kecamatan Sungai Kakap	39
4. ATS Kecamatan Teluk Pakedai.....	41
5. ATS Kecamatan Terentang	42
6. ATS Kecamatan Sungai Raya.....	44
7. ATS Kecamatan Batu Ampar.....	46
8. ATS Kecamatan Kubu	47
9. ATS Kecamatan Rasau Jaya.....	49
3.3 Identifikasi Kelompok ATS berdasarkan Penyebab	50

3.4	Analisa Isu ATS	55
BAB IV RENCANA AKSI DAERAH.....		53
BAB V PENUTUP		71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sebaran Perkiraan Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) per Provinsi Tahun 2025	15
Tabel 1. 2 Data Anak Tidak Sekolah Kabupaten Kubu Raya	17
Tabel 2. 1 Daftar PKBM di Kabupaten Kubu Raya	29
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	34
Tabel 3. 2 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Sungai Ambawang	36
Tabel 3. 3 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Kuala Mandor B	38
Tabel 3. 4 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Sungai Kakap	39
Tabel 3. 5 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Teluk Pakedai	41
Tabel 3. 6 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Terentang	43
Tabel 3. 7 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Sungai Raya	44
Tabel 3. 8 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Batu Ampar	46
Tabel 3. 9 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Kubu	48
Tabel 3. 10 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Rasau Jaya	49
Tabel 3. 11 Identifikasi ATS berdasarkan alasan tidak sekolah	51
Tabel 3. 12 Analisa Isu ATS Anak yang bekerja/ pekerja anak	48
Tabel 3. 13 Analisa Isu ATS Anak Penyandang Disabilitas	49
Tabel 3. 14 Analisa Isu ATS Anak dalam pernikahan	50
Tabel 3. 15 Analisa Isu ATS Kelompok ATS lainnya (Tidak mau sekolah/ kurang motivasi)	51
Tabel 3. 16 Analisa Isu ATS Kelompok ATS lainnya (Tidak ada biaya)	52
Tabel 4. 1 Matriks Penanganan ATS Untuk Isu Anak Bekerja/ Pekerja Anak	54
Tabel 4. 2 Matrik Penanganan Ats Untuk Isu Anak Penyandang Disabilitas	57
Tabel 4. 3 Matrik Penanganan Ats Untuk Isu Anak Dalam Pernikahan	61
Tabel 4. 4 Matrik Penanganan Ats Untuk Isu Anak Dalam Pernikahan	64
Tabel 4. 5 Matrik Penanganan Ats Untuk Isu Kelompok Ats Lainnya (Tidak Ada Biaya)	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Sebaran Perkiraan Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)	15
Gambar 2. 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.....	21
Gambar 2. 2	Perkembangan Rata-rata lama sekolah Kabupaten Kubu Raya, 2020-2024.....	22
Gambar 2. 3	Rata-rata Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 - 2024	23
Gambar 2. 4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020–2024.....	24
Gambar 2. 5	APS Usia 13–15 Tahun Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020–2024.....	25
Gambar 2. 6	APS Usia 16–18 Tahun Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020–2024.....	26
Gambar 2. 7	Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya.....	27
Gambar 3. 1	Rekapitulasi Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	35
Gambar 3. 2	Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Sungai Ambawang.....	37
Gambar 3. 3	Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Kuala Mandor B	39
Gambar 3. 4	Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Sungai Kakap.....	40
Gambar 3. 5	Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Teluk Pakedai	42
Gambar 3. 6	Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Terentang.....	44
Gambar 3. 7	Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Sungai Raya	45
Gambar 3. 8	Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Batu Ampar	47
Gambar 3. 9	Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Kubu.....	49
Gambar 3. 10	Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Rasau Jaya	50
Gambar 3. 11	Grafik Identifikasi ATS berdasarkan alasan tidak sekolah	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan anak Indonesia kesempatan memperoleh pendidikan dan mendapatkan pelatihan yang bermanfaat. Melalui pelaksanaan berbagai program, Pemerintah telah meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) di tahun 2022 pada tingkat pendidikan sekolah dasar (SD/MI sederajat) mencapai 97,88 persen, tingkat menengah pertama (SMP/MTs sederajat) mencapai 80,89 persen dan untuk tingkat menengah atas mencapai 61,97 persen.

Berdasarkan hasil SUSENAS tahun 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat kurang lebih 4,087 juta anak usia sekolah 7-18 tahun di Indonesia yang tidak sekolah. Sebaran perkiraan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di tiap provinsi dapat dilihat dalam tabel dengan rincian berikut:

Tabel 1. 1 Sebaran Perkiraan Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) per Provinsi Tahun 2025

No	Kabupaten / Kota	PAU D	DO				LTM			BPB					Jumlah Total
			Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	Total	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Total	< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	Total	
1	Kab. Sambas	0	1.120	2.122	1.325	4.567	2.149	4.091	6.240	0	258	294	1.351	1.903	12.710
2	Kab. Mempawah	0	294	501	496	1.291	501	956	1.457	0	308	340	1.475	2.123	4.871
3	Kab. Sanggau	0	1.065	1200	1.212	3.477	1.587	2.026	3.613	0	506	593	2.673	3.772	10.862
4	Kab. Sintang	0	993	1.228	1.332	3.553	1.432	2.077	3.509	0	753	808	1.607	3.168	10.230
5	Kab. Kapuas Hulu	0	490	944	1.004	2.438	911	1.368	2.279	0	329	448	1.099	1.876	6.593
6	Kab. Ketapang	0	1.122	1.371	1.363	3.856	1.728	2.284	4.012	0	1.287	1.807	6.437	9.531	17.399
7	Kab. Bengkayang	0	570	881	846	2.297	645	1.246	1.891	0	377	484	1.965	2.826	7.014
8	Kab. Landak	0	320	775	1.109	2.204	712	1.914	2.626	0	575	634	1.734	2.943	7.773
9	Kab. Sekadau	0	312	597	687	1.596	652	1.135	1.787	0	202	239	732	1.173	4.556
10	Kab. Melawi	0	392	453	501	1.346	513	1.183	1.696	0	251	331	1.243	1.825	4.867
11	Kab. Kayong Utara	0	287	451	406	1.144	345	567	912	0	174	234	1.235	1.643	3.699
12	Kab. Kubu Raya	0	845	1.028	1.068	2.941	906	1.436	2.342	0	733	767	1.652	3.152	8.435
13	Kota Pontianak	0	570	658	905	2.133	591	992	1.583	0	1.014	813	1.958	3.785	7.501
14	Kota Singkawang	0	451	473	508	1.432	633	907	1.540	0	235	213	520	968	3.940

Sumber : Kementerian Dalam Negeri dan UNICEF, Panduan Perencanaan dan Penganggaran Penanganan ATS, 2025

Berdasarkan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Anak

Tidak Sekolah (ATS) didefinisikan sebagai anak usia SD/MI sederajat (7-12 tahun), sekolah SMP/MTs sederajat (13-15 tahun), dan SMA/SMK/MA sederajat (16-18 tahun) yang:

1. Tidak pernah bersekolah
2. Putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah ketika sedang berada di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/SMK/MA sederajat)
3. Putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (tidak transisi dari jenjang SD/MI sederajat ke jenjang SMP/MTs sederajat atau dari jenjang SMP/MTs sederajat ke jenjang SMA/SMK/MA sederajat)

Permasalahan ATS memiliki dampak langsung terhadap target pemenuhan SPM bidang pendidikan, mengingat pencapaian SPM bidang pendidikan sangat dipengaruhi oleh besarnya proporsi anak usia sekolah yang bersekolah terhadap populasi anak usia sekolah di suatu daerah. Dengan demikian, penanganan ATS dan Anak Berpotensi Putus Sekolah (ABPS) harus menjadi prioritas pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab dan pemenuhan mandat SPM serta hak dasar warga negara di bidang pendidikan. Di samping itu, permasalahan ATS juga berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagaimana diketahui bahwa IPM merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kualitas penduduk di suatu daerah. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu:

1. Kesehatan, diukur dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (UHH)
2. Pendidikan, diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (HLS)
3. Standar Hidup Layak (Ekonomi), diukur dengan pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan.

Berdasarkan data tahun 2024, IPM Kabupaten Kubu Raya baru mencapai 71,14, yang masih lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Barat sebesar 71,19. Rendahnya capaian ini terutama disebabkan oleh lemahnya indikator pendidikan, khususnya Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,90 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,05 tahun. Angka RLS Kabupaten Kubu Raya berada pada peringkat ketiga terendah di Kalimantan Barat, serta jauh di bawah RLS provinsi sebesar 7,78 tahun. Salah

satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya indikator pendidikan tersebut adalah masih tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan data dari Dasboard Verifikasi Validasi Anak Tidak Sekolah yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (cut off data tanggal 31 Agustus 2025), terdapat 8.435 anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Kabupaten Kubu Raya. Adapun Data ATS dan sebarannya di 9 kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1. 2
 Data Anak Tidak Sekolah Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	PAUD	DO				LTM			BPB					Jumlah Total
			Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	Total	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Total	< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	Total	
1	Kec. Kuala Mandor B	0	39	98	99	169	16	75	47	0	62	54	112	228	555
2	Kec. Sungai Ambawang	0	109	208	182	499	112	163	275	0	113	102	235	450	1.224
3	Kec. Sungai Kakap	0	176	248	288	712	263	339	602	0	158	156	372	686	2.000
4	Kec. Telok Pakedai	0	38	27	34	99	53	102	155	0	18	22	61	101	355
5	Kec. Terentang	0	47	25	14	86	31	46	77	0	15	12	49	76	239
6	Kec. Sungai Raya	0	284	242	288	814	197	375	572	0	250	289	563	1.102	2.488
7	Kec. Batu Ampar	0	59	86	65	210	83	124	207	0	52	69	136	257	674
8	Kec. Kubu	0	69	66	70	205	117	128	245	0	53	48	88	189	639
9	Kec. Rasau Jaya	0	24	27	28	79	34	82	116	0	12	15	36	63	258
-	Residu	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	3
JUMLAH		0	845	1.028	1.068	2.874	906	1.436	2.298	-	733	767	1.652	3.152	8.435

Cut off data tanggal 31 Agustus 2025

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Semester 2 Tahun 2024, anak usia sekolah (7-18 tahun) di Kabupaten Kubu Raya berjumlah 133.758 anak, sehingga anak yang tidak bersekolah sebesar 6,31%. Angka ini menunjukkan bahwa ternyata masih banyak anak yang belum mendapatkan akses pendidikan sebagaimana mestinya. Faktor penyebab tingginya angka ATS di Kabupaten Kubu Raya antara lain adalah keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil, kondisi sosial ekonomi keluarga, pernikahan dini, masih belum tersedianya layanan pendidikan yang memadai untuk anak rentan seperti anak penyandang disabilitas serta masih terbatasnya kesadaran pentingnya pendidikan.

Dengan tingginya angka ATS di Kabupaten Kubu Raya, kondisi yang ada sekarang adalah:

1. Belum ada data terpadu mengenai jumlah dan sebaran anak tidak sekolah sehingga belum menjadi basis perencanaan bersama.
2. Belum ada arah kebijakan yang jelas khusus penanganan ATS sehingga program kegiatan bersifat parsial dan belum terarah pada target bersama

serta belum ada kolaborasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan .

3. Anggaran sektor pendidikan masih belum berpihak pada penanganan ATS.
4. Sulit untuk mengukur capaian penanganan ATS karena belum ada standar dan indikator bersama.

Untuk itulah dipandang perlu untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD PATS) di Kabupaten Kubu Raya yang diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mendorong keterlibatan aktif berbagai pihak melalui pendekatan kolaboratif, sekaligus menjadi pijakan awal bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada hak anak atas pendidikan.

Penyusunan RAD PATS ini juga merupakan amanah dari Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 263/BAPPEDALITBANG/2023 tentang Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kubu Raya, di mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) berkedudukan sebagai Ketua dalam Tim Koordinasi ini. pada Diktum Kedua dinyatakan tugas Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah antara lain:

- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kubu Raya
- b. menyinkronisasikan penyusunan rencana program dan kegiatan penanganan anak tidak sekolah antar perangkat daerah dan pemerintah desa maupun pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Kubu Raya.

Langkah ini juga selaras dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya pada Prioritas 4: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Salah satu fokus utama prioritas ini adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta penurunan angka putus sekolah dan anak tidak sekolah di seluruh wilayah Indonesia

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029
21. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 263/BAPPEDALITBANG/2023 tentang Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kubu Raya

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD P-ATS) yang merupakan pengembangan dari Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas P-ATS), bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman resmi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program penanganan ATS serta memastikan intervensi yang dilakukan lebih terarah, sistematis, dan sesuai kebutuhan daerah.
2. Diadopsi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
3. Memastikan agar setiap anak di Kabupaten Kubu Raya memperoleh layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kehidupan mereka.

1.3 Sistematika

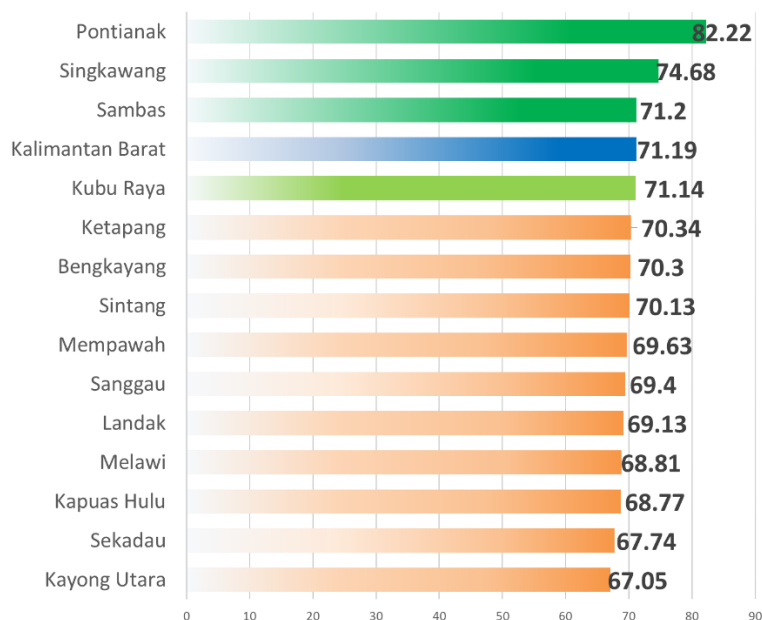
BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: KONDISI UMUM PENDIDIKAN
BAB III	: ANALISIS SITUASI ANAK TIDAK SEKOLAH
BAB IV	: RENCANA AKSI DAERAH
BAB V	: PENUTUP

BAB II

KONDISI UMUM PENDIDIKAN

2.1 Kondisi Umum Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) serta pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.



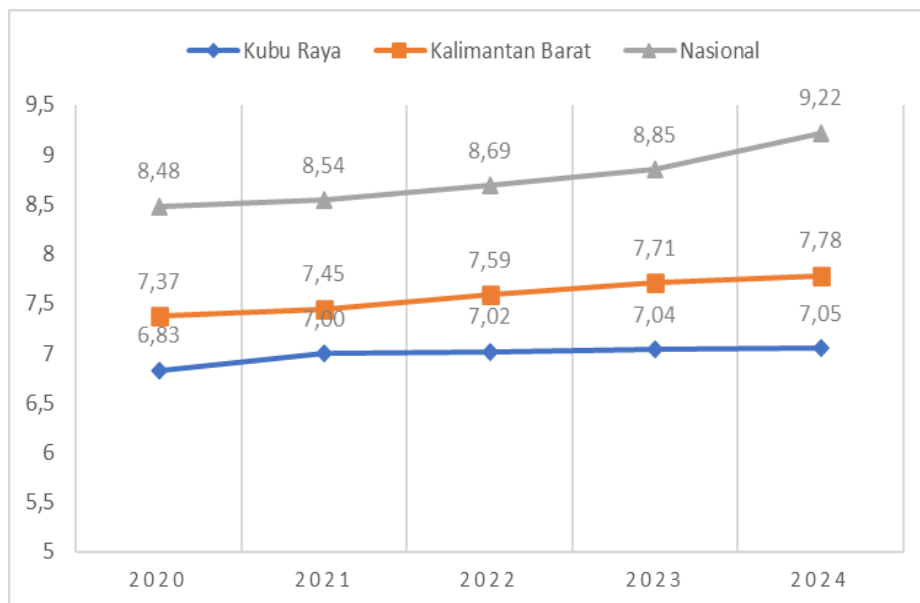
Gambar 2. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kubu Raya mencapai 71,14 dan berada pada kategori tinggi, menempati peringkat ke-4 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Nilai ini menunjukkan adanya kemajuan dibandingkan tahun 2020 dengan IPM 68,89, atau meningkat rata-rata 0,81% per tahun. Dimensi pengetahuan pada IPM diukur melalui dua indikator utama yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

2.2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan

formal. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kubu Raya periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan meskipun relatif lambat.



Gambar 2. 2 Perkembangan Rata-rata lama sekolah Kabupaten Kubu Raya, 2020-2024

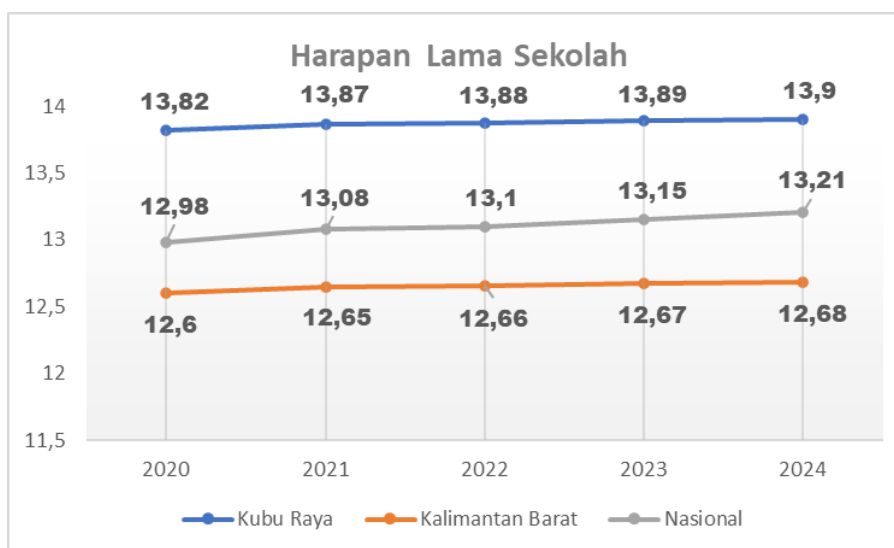
Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 6,83 dan meningkat menjadi 7,00 pada tahun 2021. Tren kenaikan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, yakni 7,02 pada tahun 2022, 7,04 pada tahun 2023, hingga mencapai 7,05 pada tahun 2024. Dengan demikian, dalam kurun lima tahun terakhir, peningkatan rata-rata lama sekolah hanya sebesar 0,05 tahun. Capaian ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbaikan dari tahun ke tahun, laju peningkatan masih relatif stagnan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa masyarakat di Kabupaten Kubu Raya rata-rata hanya menempuh pendidikan hingga setingkat kelas VII atau awal jenjang SMP. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih intensif untuk mendorong anak-anak agar melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah, melalui pemerataan sarana pendidikan, dukungan bagi keluarga kurang mampu, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan lanjutan.

2.3 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah

penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kubu Raya pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 13,82 pada tahun 2020 dan meningkat secara bertahap menjadi 13,87 pada tahun 2021, 13,88 pada tahun 2022, 13,89 pada tahun 2023, hingga mencapai 13,90 pada tahun 2024. Dengan demikian, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kabupaten Kubu Raya berhasil menambah harapan lama sekolah sebesar 0,08 tahun. Peningkatan HLS ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan peluang pendidikan bagi masyarakat. Angka 13,90 pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa anak-anak di Kabupaten Kubu Raya memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga setingkat perguruan tinggi awal (semester pertama). Meskipun peningkatannya relatif kecil, konsistensi kenaikan ini merupakan sinyal positif bahwa kebijakan pendidikan dan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Kubu Raya mulai memberikan dampak nyata.



Gambar 2. 3 Rata-rata Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 - 2024

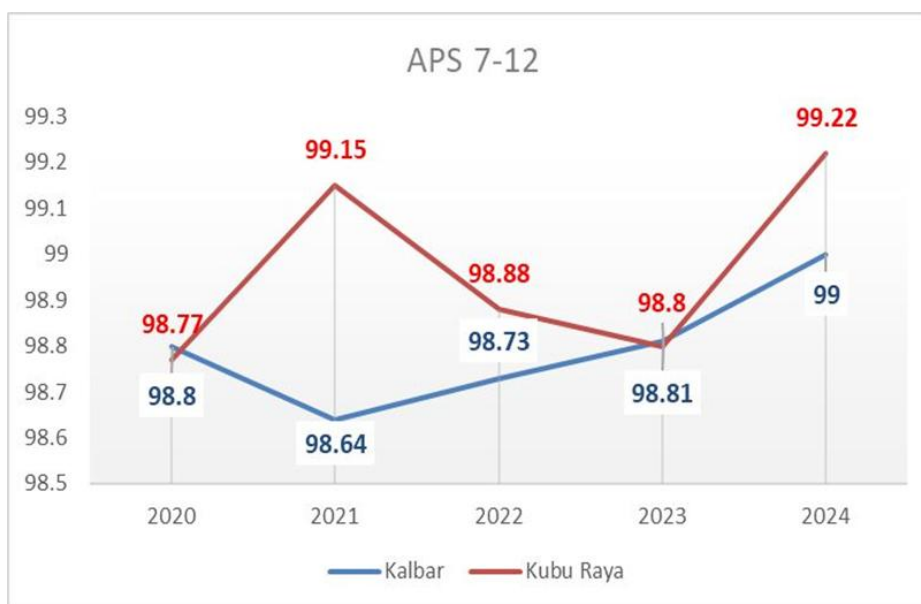
2.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator penting yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk usia sekolah dalam kegiatan pendidikan formal. APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang masih bersekolah terhadap total penduduk pada

kelompok umur yang sama. Melalui analisis APS, dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dan mengidentifikasi potensi Anak Tidak Sekolah (ATS).

Secara umum, capaian APS Kabupaten Kubu Raya selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan pola yang bervariasi antar kelompok usia. Pada kelompok usia 7–12 tahun (setara SD), APS menunjukkan kinerja yang sangat baik dan stabil. Namun, pada kelompok usia 13–15 tahun (setara SMP) dan 16–18 tahun (setara SMA/SMK), terlihat adanya penurunan tingkat partisipasi, yang mengindikasikan masih adanya anak dan remaja yang belum bersekolah atau putus sekolah.

2.4.1 APS Usia 7–12 Tahun (Setara Sekolah Dasar)



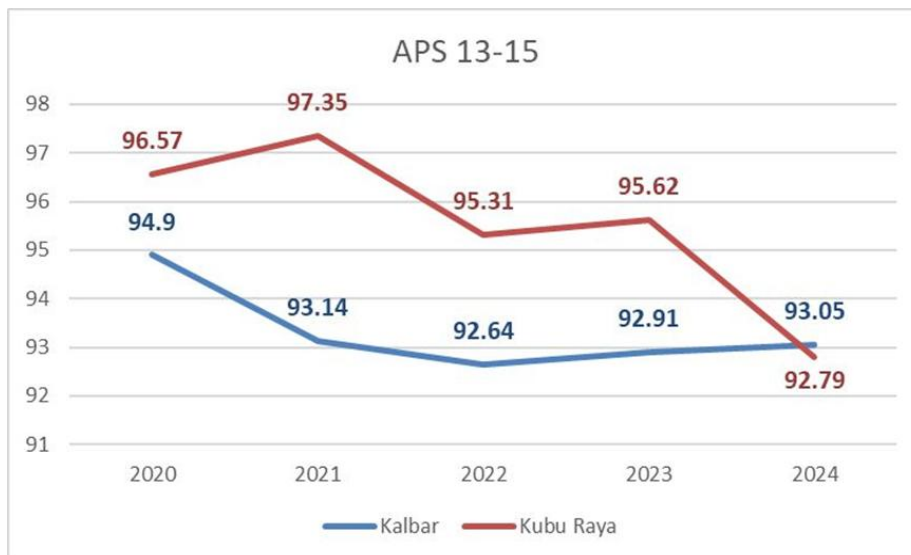
Gambar 2. 4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020–2024

Selama periode 2020–2024, APS usia 7–12 tahun di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan stabil, mendekati universal. Tahun 2020 APS tercatat sebesar 98,77%, meningkat menjadi 99,15% pada 2021. Setelah sempat sedikit menurun menjadi 98,88% (2022) dan 98,8% (2023), APS kembali naik pada 2024 menjadi 99,22%. Capaian tersebut konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Barat (98,6%–99%).

Capaian ini menggambarkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Kabupaten Kubu Raya telah bersekolah. Pemerintah daerah berhasil mempertahankan akses pendidikan dasar yang luas dan merata. Fokus ke depan

diarahkan pada pencegahan putus sekolah serta penguatan mutu pembelajaran di tingkat dasar.

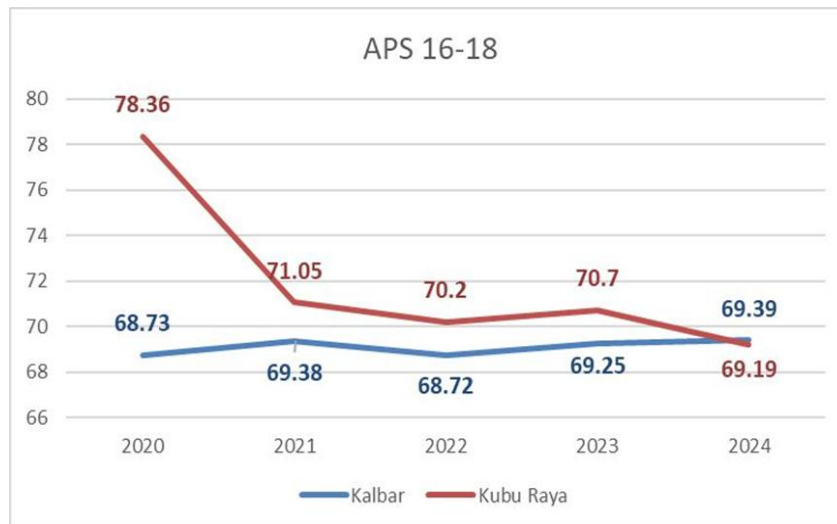
2.4.2 APS Usia 13-15 Tahun (Setara Sekolah Menengah Pertama)



Gambar 2. 5 APS Usia 13–15 Tahun Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020–2024

APS pada kelompok usia 13–15 tahun menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Tahun 2020 APS mencapai 96,57%, meningkat menjadi 97,35% (2021). Selanjutnya menurun menjadi 95,31% (2022), 95,62% (2023), dan 92,79% (2024). Pada 2024, angka ini bahkan sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi Kalimantan Barat (93,05%). Penurunan APS jenjang SMP menandakan adanya peningkatan potensi Anak Tidak Sekolah (ATS), terutama pada masa transisi dari SD ke SMP. Faktor yang berpengaruh antara lain keterbatasan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama di wilayah tertentu, kondisi ekonomi keluarga yang belum mampu mendukung keberlanjutan pendidikan anak, serta kurangnya motivasi atau dukungan sosial terhadap pendidikan menengah.

Upaya intervensi yang diperlukan meliputi peningkatan aksesibilitas sekolah, program beasiswa atau bantuan pendidikan, dan penguatan pendidikan kesetaraan untuk menjangkau anak usia SMP yang tidak bersekolah.



Gambar 2. 6 APS Usia 16–18 Tahun Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020–2024

Pada kelompok usia 16–18 tahun, APS Kabupaten Kubu Raya menunjukkan tren penurunan tajam pada awal periode dan cenderung stagnan pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2020 APS mencapai 78,36%, namun turun menjadi 71,05% (2021) dan 70,2% (2022). Sedikit peningkatan terjadi pada 2023 (70,7%), tetapi kembali turun menjadi 69,19% (2024), mendekati angka provinsi (69,39%). Capaian APS yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa sekitar 30% remaja di Kubu Raya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK. Kelompok usia ini menjadi prioritas utama dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Faktor penyebab rendahnya APS antara lain terbatasnya ketersediaan sekolah menengah atas di wilayah pedesaan, faktor ekonomi keluarga yang mendorong remaja untuk bekerja, serta kurangnya minat dan motivasi melanjutkan pendidikan formal.

Langkah strategis yang perlu diambil antara lain perluasan akses pendidikan menengah dan pembangunan unit sekolah baru, peningkatan peran PKBM sebagai jalur alternatif pendidikan bagi remaja putus sekolah, serta penguatan dukungan sosial ekonomi bagi keluarga miskin untuk memastikan keberlanjutan pendidikan anak.

Dengan kondisi tersebut, arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PATS) Kabupaten Kubu Raya perlu difokuskan pada:

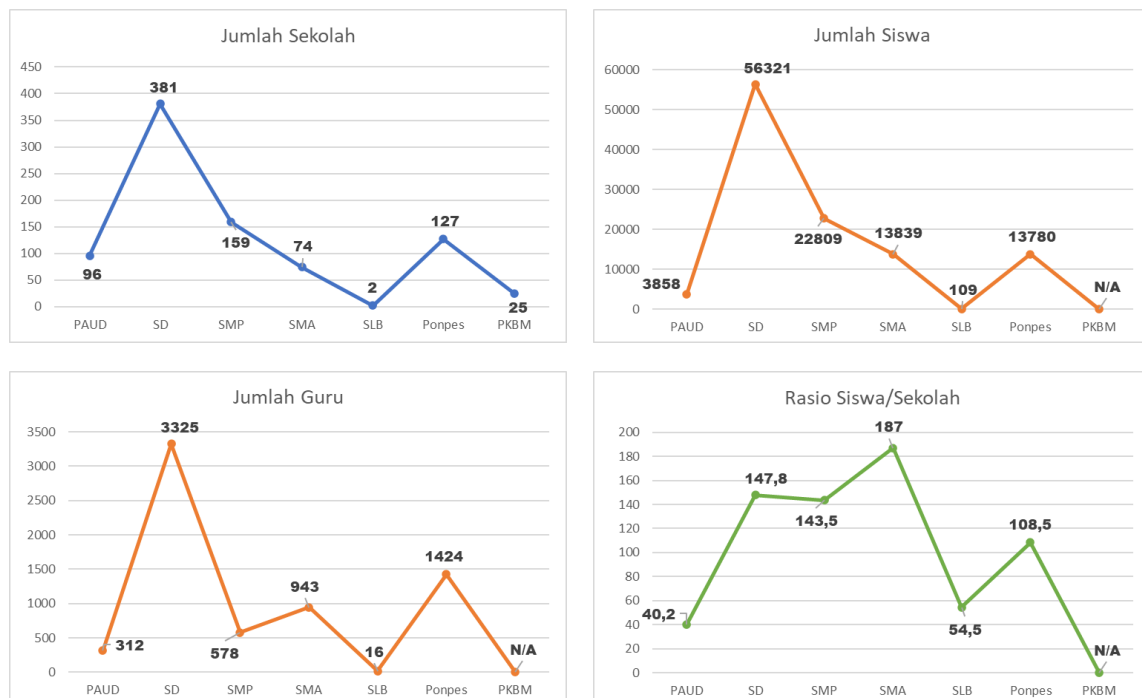
- a. Peningkatan akses dan retensi pendidikan jenjang menengah.

- b. Perluasan layanan pendidikan nonformal melalui PKBM dan program kesetaraan.
- c. Kolaborasi lintas sektor dalam pemberian dukungan sosial, ekonomi, dan motivasi pendidikan bagi anak dan keluarga.

2.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Ketersediaan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Kubu Raya masih belum merata dan memadai. Berdasarkan data Data Pokok Pendidikan 2025 kondisi sekolah, siswa, dan guru sebagai berikut:

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan 2025 data jumlah satuan pendidikan, peserta didik, dan tenaga pendidik di Kabupaten Kubu Raya, kondisi sarana dan prasarana pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 7 Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Terdapat 96 lembaga PAUD, terdiri atas 10 negeri dan 86 swasta. Jumlah peserta didik mencapai 3.858 anak dengan 312 guru. Dominasi lembaga swasta menunjukkan peran besar masyarakat dalam penyediaan sarana PAUD. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) terdapat 381 SD (326 negeri dan 55 swasta) dengan jumlah siswa 56.321 orang

dan 3.325 guru. Ketersediaan sekolah negeri cukup memadai, namun rasio siswa terhadap sekolah masih tinggi. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 159 SMP (88 negeri dan 71 swasta) dengan jumlah siswa 22.809 orang dan 578 guru. Pemerataan fasilitas SMP perlu ditingkatkan karena hampir separuhnya dikelola swasta.

Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 74 SMA (29 negeri dan 45 swasta) dengan jumlah siswa 13.839 orang dan 943 guru. Rasio sekolah swasta yang lebih tinggi menunjukkan perlunya peningkatan peran pemerintah.

Pada satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) terdapat 2 SLB (1 negeri dan 1 swasta) dengan 109 siswa dan 16 guru. Ketersediaan SLB masih terbatas sehingga perlu pengembangan sarana inklusif. Pada Pondok Pesantren (Ponpes): Terdapat 127 ponpes dengan 13.780 santri dan 1.424 guru. Ponpes berperan signifikan dalam pendidikan berbasis agama dan memerlukan dukungan sarana memadai. Sedangkan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdapat 25 PKBM yang melayani pendidikan nonformal, berperan penting dalam pemberantasan buta aksara dan memberikan kesempatan belajar bagi warga yang tidak mengakses pendidikan formal.

2.6 Kondisi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Kubu Raya

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Kubu Raya memiliki peran penting dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yaitu sebagai lembaga pendidikan nonformal. PKBM memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang putus sekolah maupun yang belum sempat menikmati layanan pendidikan formal. Program kesetaraan Paket A, B, dan C menjadi jalur utama yang memungkinkan anak-anak tersebut memperoleh ijazah setara SD, SMP, hingga SMA.

Lebih dari itu, PKBM juga menawarkan program keterampilan berbasis potensi lokal sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga keahlian praktis yang mendukung kemandirian ekonomi. Dengan pendekatan yang fleksibel, PKBM mampu menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, daerah terpencil, maupun mereka yang terkendala faktor sosial budaya

Tabel 2. 1 Daftar PKBM di Kabupaten Kubu Raya

No	Wilayah	Total PKBM	No	Nama PKBM	NPSN
1	Kec. Kuala Mandor B	3	1	PKBM AL-IHSAN	P9998668
			2	PKBM KUNCI ILMU	P9970265
			3	PKBM SUMBER ILMU	P9970264
2	Kec. Kubu	1	1	PKBM SIMPATI	P9908484
3	Kec. Rasau Jaya	1	1	PKBM MARGA JAYA	P9908485
4	Kec. Telok Pakedai	1	1	PKBM AYO MAJU	P9934733
5	Kec. Terentang	2	1	PKBM HASANAH	P9908490
			2	PKBM MERDEKA	P9947905
6	Kec. Sungai Raya	9	1	PKBM ADAM	P9948187
			2	PKBM APRILA	P2970103
			3	PKBM BINA MULIA	P9997854
			4	PKBM John The Baptist School	P2970758
			5	PKBM KARSA CIPTA MANDIRI INDONESIA	P9998316
			6	PKBM KHADIJAH	P9970519
			7	PKBM Lentera Kasih	P9999887
			8	PKBM RAMA	P9997788
			9	PKBM SIRATUL JANNAH	P9970252
7	Kec. Sungai Kakap	7	1	PKBM BERKAT MANDIRI	P9996716
			2	PKBM BHAKTI NUSANTARA	P9999903
			3	PKBM HARAPAN ANANDA	P2970730
			4	PKBM HARAPAN KITA	P2970104
			5	PKBM KAMPUNG BACA TANSAL	P9998449
			6	PKBM PROKINDO	P9908780
			7	PKBM RUMAH PINTAR PUNGGUR CERDAS	P9998380
8	Kec. Sungai Ambawang	3	1	PKBM AINUL YAQIN	P9908486
			2	PKBM ANGGREK	P2970101
			3	PKBM GEMPITA PERSADA	P2970768
9	Kec. Batu Ampar	0		BELUM MEMILIKI PKBM	
Total		27			

sumber : <https://dapo.kemendikdasmen.go.id>

Di Kabupaten Kubu Raya terdapat 27 PKBM yang tersebar di 8 kecamatan, sementara Kecamatan Batu Ampar belum memiliki PKBM. Keberadaan lembaga ini menjadi ujung tombak dalam mendukung Rencana Aksi Daerah penanganan ATS. PKBM berperan sebagai alternatif pendidikan, pusat pengembangan keterampilan, serta wadah pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

BAB III

ANALISIS SITUASI ANAK TIDAK SEKOLAH

3.1 Kelompok Anak Tidak Sekolah Prioritas

Mengacu pada arah program serta intervensi pemerintah Indonesia yang dituangkan melalui kebijakan dan program prioritas Kementerian/Lembaga terkait, ATS pada strategi nasional ini dikategorikan sebagai berikut:

1. Anak yang berada di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)

Anak-anak dalam kelompok ATS adalah mereka yang tidak bisa mengakses pendidikan formal maupun nonformal karena hambatan geografis, keterpencilan, atau ketiadaan lembaga pendidikan di daerahnya. Wilayah 3T, terdepan, terluar, terisolir, dan tertinggal, umumnya menghadapi kekurangan guru, tingginya absensi tenaga pendidik, keterbatasan fasilitas sekolah, serta lemahnya pengawasan. Situasi ini membuat masyarakat sering memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya.

2. Anak yang bekerja dan pekerja anak

Kelompok ATS ini mencakup anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah karena harus bekerja. Anak yang bekerja dapat berupa mereka yang dipekerjakan oleh suatu badan usaha dengan menerima upah, maupun yang terlibat dalam aktivitas produktif lainnya. Aktivitas produktif yang dimaksud mencakup kegiatan produksi barang atau jasa untuk dijual, atau pekerjaan rumah tangga serta aktivitas produktif nonkomersial yang ditujukan bagi kebutuhan keluarga. Keputusan anak-anak ini untuk meninggalkan bangku pendidikan biasanya dilatarbelakangi oleh beragam alasan, antara lain membantu perekonomian keluarga, meringankan beban orang tua, maupun untuk memperoleh penghasilan sendiri.

3. Anak penyandang disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dengan disabilitas didefinisikan sebagai anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu panjang, yang dalam interaksinya dengan lingkungan dan sikap masyarakat

kerap menghadapi hambatan sehingga kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan

4. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mencakup anak yang terlibat konflik hukum, anak korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi. Sebagian besar ABH menghadapi kendala dalam menempuh pendidikan, sehingga banyak di antara mereka yang akhirnya tidak bersekolah. ABH didefinisikan sebagai anak berusia 12–18 tahun, yang umumnya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Tanggung jawab utama dalam pemenuhan layanan pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak di lembaga tersebut berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

5. Anak jalanan (Anjal) dan anak terlantar (Antar)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, anak jalanan didefinisikan sebagai anak yang rentan atau bekerja di jalanan, menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan maupun tempat umum, serta mencari nafkah atau berkeliranan di ruang-ruang publik tersebut. Sementara itu, anak terlantar adalah anak berusia 6–18 tahun yang ditelantarkan atau diperlakukan salah oleh orang tua/keluarganya, atau kehilangan pengasuhan dari mereka. Kriteria anak terlantar mencakup anak yang berasal dari keluarga miskin, anak yang diabaikan orang tuanya, serta anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi.

6. Anak dalam pernikahan anak / ibu remaja

Kelompok ini mencakup anak dan remaja berusia di bawah 18 tahun yang sudah menikah dan tidak melanjutkan pendidikan, maupun yang masih bersekolah tetapi berisiko putus sekolah akibat pernikahan. Anak perempuan yang hamil atau menjadi ibu pada usia remaja, baik dalam ikatan pernikahan maupun di luar pernikahan, juga termasuk dalam kategori ini. Hambatan pendidikan yang mereka hadapi umumnya bersumber dari stigma negatif masyarakat terhadap kondisi tersebut. Dalam banyak kasus, hambatan juga

dipicu oleh tekanan keluarga dan lingkungan, rasa malu, serta penolakan pihak sekolah dalam memberikan layanan pendidikan.

7. Kelompok ATS lainnya

Kelompok ATS ini mencakup kategori anak yang belum termasuk dalam klasifikasi sebelumnya. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak yang tidak bersekolah karena hambatan ekonomi atau faktor sosial budaya, namun bukan tergolong sebagai pekerja anak, penyandang disabilitas, anak terlantar, anak jalanan, maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Kelompok ini juga mencakup anak-anak yang secara ekonomi maupun geografis memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan, tetapi memilih untuk tidak bersekolah atau mengikuti layanan pendidikan apa pun. Keputusan tersebut umumnya didasari oleh anggapan bahwa pendidikan atau pelatihan yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan hidup mereka atau keluarganya. Selain itu, kelompok ini juga meliputi anak dalam situasi rentan lain, seperti anak-anak TKI di luar negeri, anak yang terdampak bencana, serta korban pelecehan.

Kelompok ATS yang telah disebutkan sebelumnya merupakan penerima manfaat dari berbagai kebijakan dan program yang dikelola oleh sejumlah kementerian/lembaga, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Strategi Nasional ATS, kelompok ini diposisikan sebagai sasaran utama intervensi penanganan. Walaupun sebagian anak dalam kelompok tersebut masih mengakses layanan pendidikan atau bersekolah, mereka tetap dikategorikan sebagai prioritas sasaran karena berada dalam kondisi rentan atau berisiko putus sekolah. Oleh karena itu, kelompok ini secara khusus menjadi target utama strategi pencegahan.

3.2 Identifikasi Kelompok ATS berdasarkan Sebaran Wilayah

Berdasarkan Stranas ATS terdapat 3 jenis ATS sbb:

1. *Drop Out* (DO)
2. Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)
3. Belum Pernah Bersekolah (BPB)

Dari sumber data Dashboard Anak Tidak Sekolah Pusdatin Kemendikdasmen cut off data 30 Agustus 2025, diketahui jumlah ATS yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dengan 123 (seratus dua puluh tiga) desa sebanyak 6.228 ATS. Adapun persebaran wilayah ATS di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Jenis ATS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Rekapitulasi Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

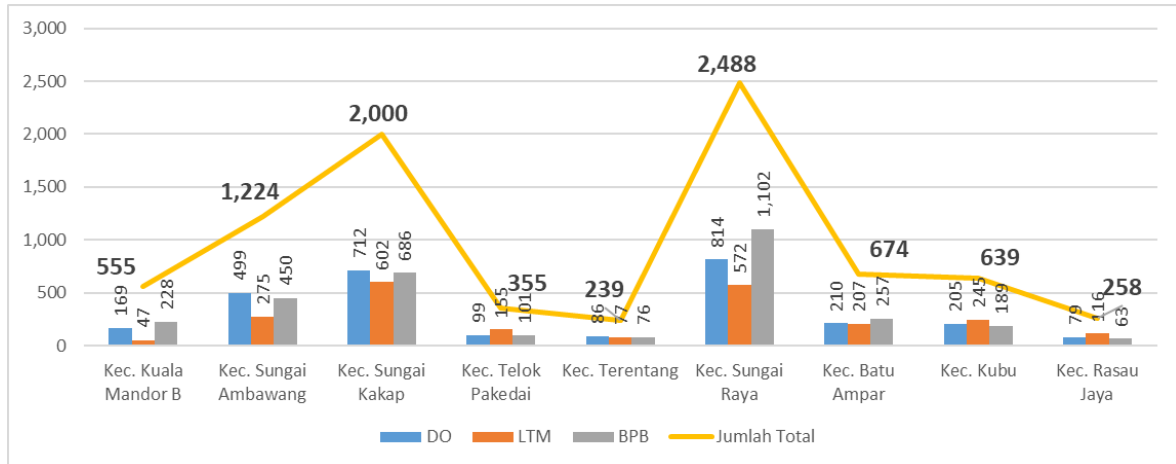
No	Kecamatan	PAUD	DO				LTM			BPB					Jumlah Total
			Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	Total	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Total	< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	Total	
1	Kec. Kuala Mandor B	0	39	98	99	169	16	75	47	0	62	54	112	228	555
2	Kec. Sungai Ambawang	0	109	208	182	499	112	163	275	0	113	102	235	450	1.224
3	Kec. Sungai Kakap	0	176	248	288	712	263	339	602	0	158	156	372	686	2.000
4	Kec. Telok Pakedai	0	38	27	34	99	53	102	155	0	18	22	61	101	355
5	Kec. Terentang	0	47	25	14	86	31	46	77	0	15	12	49	76	239
6	Kec. Sungai Raya	0	284	242	288	814	197	375	572	0	250	289	563	1.102	2.488
7	Kec. Batu Ampar	0	59	86	65	210	83	124	207	0	52	69	136	257	674
8	Kec. Kubu	0	69	66	70	205	117	128	245	0	53	48	88	189	639
9	Kec. Rasau Jaya	0	24	27	28	79	34	82	116	0	12	15	36	63	258
-	Residu	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	3
JUMLAH		0	845	1.028	1.068	2.874	906	1.436	2.298	-	733	767	1.652	3.152	8.435

Kasus DO mencapai 1.740 anak. Angka ini terbagi atas 409 anak di jenjang SD, 628 anak di jenjang SMP, dan 703 anak di jenjang SMA/SMK. Data ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak siswa yang mengalami putus sekolah. Kecamatan dengan angka DO tertinggi adalah Sungai Raya (526 anak). Sebaliknya, Terentang memiliki angka DO terendah, hanya 25 anak, yang menunjukkan kondisi relatif lebih baik dibanding kecamatan lain.

Kategori LTM mencatat total 1.336 anak. Anak-anak ini sudah lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya namun tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Mayoritas berasal dari lulusan SMP (796 anak) dibanding lulusan SD (540 anak). Jumlah LTM terbesar ada di Sungai Raya (368 anak) dan Sungai Kakap (355 anak). Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun berhasil menyelesaikan SMP, banyak anak di wilayah ini tidak melanjutkan ke SMA/SMK. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah LTM terendah adalah Kuala Mandor B (47 anak).

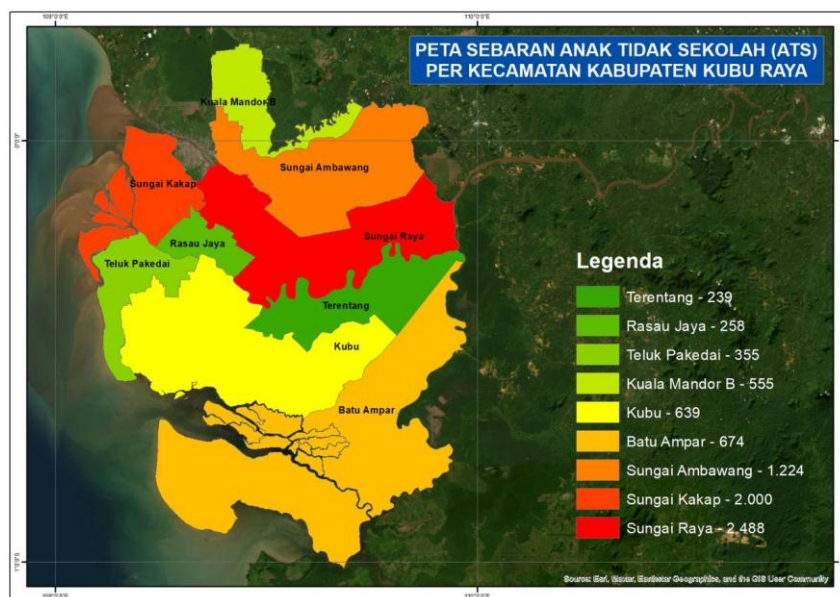
Kategori BPB menyoroti anak yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan formal. Jumlahnya cukup besar, yakni 3.152 anak. Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, mayoritas berada pada usia >15 tahun (1.652 anak), diikuti usia 13–15 tahun (767 anak), dan usia 7–12 tahun (733 anak). Hal ini menggambarkan bahwa terdapat generasi yang sudah memasuki usia produktif tetapi tidak memiliki pengalaman sekolah sama sekali. Sungai Raya menempati

posisi teratas dengan 1.102 anak, sementara Sungai Kakap berada di urutan kedua dengan 686 anak. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan pendidikan yang cukup serius di wilayah tersebut. Kecamatan dengan jumlah BPB terendah adalah Rasau Jaya (63 anak).



Gambar 3. 1 Rekapitulasi Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

Sungai Raya memiliki angka tertinggi di hampir semua kategori, dengan total 2.488 anak tidak sekolah. Hal ini berarti hampir sepertiga dari kasus kabupaten terjadi di kecamatan ini. Sungai Kakap berada di urutan kedua tertinggi dengan jumlah 2.000 anak, sebaliknya, Terentang (239 anak) dan Rasau Jaya (258 anak) adalah kecamatan dengan jumlah paling sedikit, sehingga dapat dianggap sebagai wilayah dengan masalah relatif lebih rendah.



Gambar 3. 2 Peta Sebaran Anak Tidak Sekolah Kabupaten Kubu Raya

Untuk memberikan gambaran yang lebih terarah dan untuk memahami kondisi anak tidak sekolah di Kabupaten Kubu Raya secara lebih komprehensif, tidak cukup hanya melihat angka secara agregat di tingkat kabupaten. Distribusi anak tidak sekolah juga perlu ditelusuri lebih detail hingga level kecamatan dan desa. Hal ini penting karena setiap wilayah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan aksesibilitas pendidikan yang berbeda, sehingga penyebab dan tingkat kerawanan ATS pun bisa sangat bervariasi.

1. ATS Kecamatan Sungai Ambawang

Jumlah total Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Sungai Ambawang tercatat sebanyak 918 anak. Angka ini terdiri dari kategori DO sebanyak 301 anak, LTM sebanyak 167 anak, dan Belum Pernah Bersekolah (BPB) sebanyak 450 anak. Jika dilihat dari distribusi per desa, tampak adanya variasi yang cukup signifikan antara desa satu dengan yang lain.

Tabel 3. 2 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Sungai Ambawang

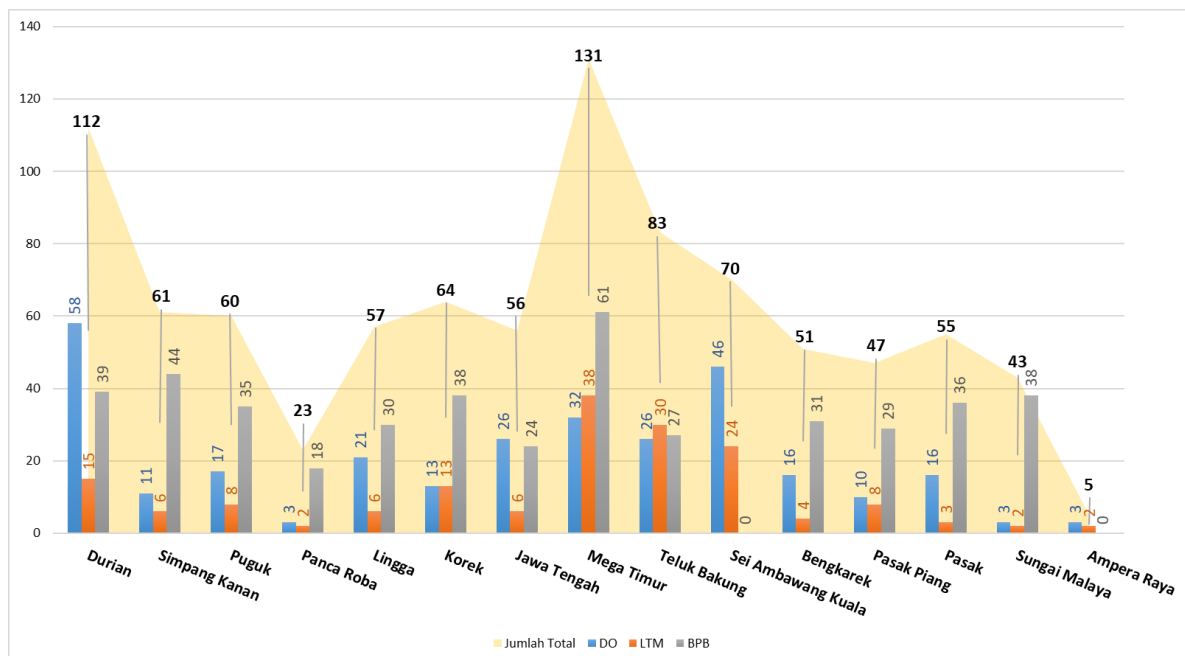
No	Desa	PAUD	DO				LTM			BPB					Jumlah Total
			Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	Total	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Total	< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	Total	
1	Durian	0	10	39	9	58	6	9	15	0	11	7	21	39	112
2	Simpang Kanan	0	1	6	4	11	2	4	6	0	10	10	24	44	61
3	Puguk	0	6	6	5	17	6	2	8	0	5	7	23	35	60
4	Panca Roba	0	2	1	0	3	2	0	2	0	6	5	7	18	23
5	Lingga	0	3	1	17	21	2	4	6	0	6	7	17	30	57
6	Korek	0	0	8	5	13	3	10	13	0	14	7	17	38	64
7	Jawa Tengah	0	1	14	11	26	4	2	6	0	4	7	13	24	56
8	Mega Timur	0	13	5	14	32	13	25	38	0	14	23	24	61	131
9	Teluk Bakung	0	2	15	9	26	8	22	30	0	6	7	14	27	83
10	Sei Ambawang Kuala	0	3	29	14	46	4	20	24	0	0	0	0	0	70
11	Bengkarek	0	2	9	5	16	4	0	4	0	10	3	18	31	51
12	Pasak Piang	0	3	0	7	10	6	2	8	0	7	5	17	29	47
13	Pasak	0	4	4	8	16	2	1	3	0	7	8	21	36	55
14	Sungai Malaya	0	1	1	1	3	2	0	2	0	13	6	19	38	43
15	Ampera Raya	0	1	2	0	3	2	0	2	0	0	0	0	0	5
-	Residu	0	57	68	73	198	46	62	108	0	0	0	0	0	306
JUMLAH		-	109	208	182	499	112	163	275	-	113	102	235	450	1,224

Total DO mencapai 301 anak, terbagi menjadi 52 anak di jenjang SD, 140 anak di jenjang SMP, dan 109 anak di jenjang SMA/SMK. Desa dengan jumlah DO tertinggi adalah Durian (58 anak), diikuti oleh Desa Sungai Ambawang Kuala (46 anak), dan Mega Timur (32 anak). Sementara itu, desa dengan angka DO terendah adalah Ampera Raya (3 anak), Sungai Malaya (3 anak) dan Panca Roba (3 anak).

Jumlah LTM di Sungai Ambawang adalah 167 anak, terdiri atas 66 lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP, dan 101 lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK. Desa dengan angka LTM tertinggi adalah Mega Timur (38 anak) dan Teluk Bakung (30 anak). Desa dengan angka terendah antara lain Panca

roba, Sungai Malaya dan Ampera Raya dengan jumlah anak LTM masing masing hanya 2 anak.

Jumlah kasus BPB di Kecamatan Sungai Ambawang adalah 450 anak. Jika dilihat per kelompok usia: Usia < 7 tahun: 0 (nol) anak, Usia 7–12 tahun: 113 anak, Usia 13–15 tahun: 102 anak, dan > 15 tahun sebanyak 235 anak. Artinya, mayoritas anak yang belum pernah sekolah sudah berada pada usia >15 tahun, sehingga berisiko tidak memperoleh akses pendidikan formal sama sekali. Desa dengan jumlah BPB tertinggi adalah Mega Timur (61 anak), kemudian Simpang Kanan (44 anak), serta Durian (39 anak). Sementara desa dengan jumlah terendah dengan tidak mencatatkan kasus BPB (0 anak) adalah Sungai Ambawang Kuala dan Ampera Raya.



Gambar 3. 3 Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Sungai Ambawang

Desa Mega Timur mencatat jumlah ATS tertinggi, yaitu 131 anak, dengan dominasi pada kategori BPB dan LTM. Desa Durian dan Teluk Bakung juga menjadi penyumbang terbesar dengan masing-masing 112 anak dan 183 anak. Sebaliknya, Desa Ampera Raya hanya mencatat 5 anak ATS, menjadikannya desa dengan kasus paling sedikit.

2. ATS Kecamatan Kuala Mandor B

Jumlah total Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Kuala Mandor B tercatat sebanyak 444 anak. Angka ini berasal dari DO sebanyak 169 anak, LTM

sebanyak 47 anak, dan BPB sebanyak 228 anak. Data juga menunjukkan variasi sebaran ATS antar desa yang cukup signifikan, seperti di Desa Padi Jaya yang tidak memiliki kasus ATS karena merupakan Desa Baru.

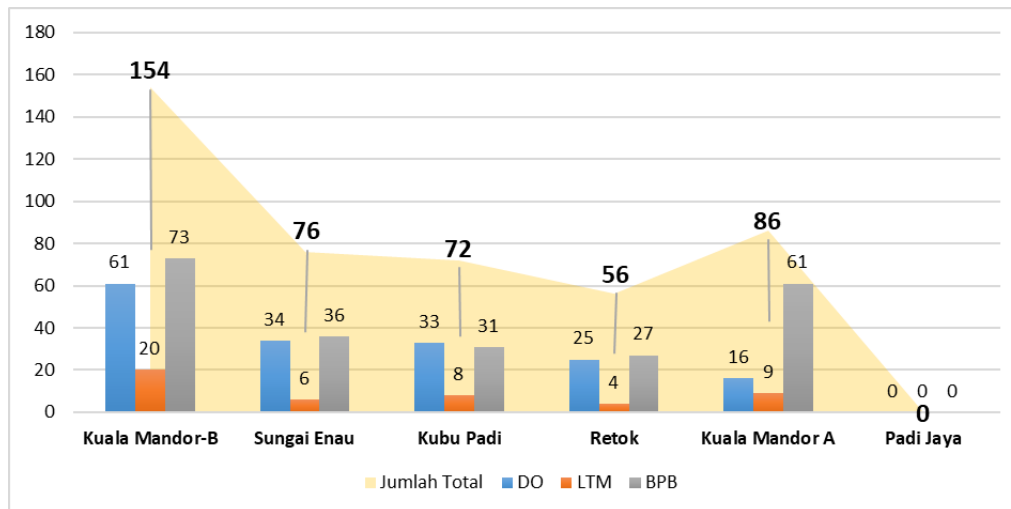
Tabel 3. 3 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Kuala Mandor B

No	Desa	PAUD	DO				LTM			BPB					Jumlah Total
			Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	Total	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Total	< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	Total	
1	Kuala Mandor B	0	10	33	18	61	2	18	20	0	20	10	43	73	154
2	Sungai Enau	0	7	10	17	34	0	6	6	0	6	12	18	36	76
3	Kubu Padi	0	6	5	22	33	1	7	8	0	8	11	12	31	72
4	Retok	0	4	11	10	25	0	4	4	0	9	7	11	27	56
5	Kuala Mandor A	0	1	9	6	16	3	6	9	0	19	14	28	61	86
-	Residu	0	11	30	26	67	10	34	44	-	-	-	-	-	111
JUMLAH		0	39	98	99	169	16	75	47	-	62	54	112	228	555

Jumlah total DO adalah 169 anak, terbagi menjadi 28 anak di SD, 68 anak di SMP, dan 73 anak di SMA/SMK. Desa dengan angka DO tertinggi adalah Kuala Mandor B (61 anak) dan Sungai Enau (34 anak). Desa dengan angka DO terendah adalah Padi Jaya (0 anak), hal ini dikarenakan Padi Jaya merupakan Desa baru yang merupakan pecahan dari Desa Kubu Padi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa putus sekolah banyak terjadi di jenjang menengah (SMP–SMA/SMK), sama seperti pola di kecamatan lain.

Jumlah LTM mencapai 47 anak, terdiri dari 6 anak lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP, dan 41 anak lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK. Desa dengan jumlah LTM tertinggi adalah Kuala Mandor B (20 anak), diikuti oleh Kuala Mandor A (9 anak). Desa dengan jumlah LTM paling sedikit adalah Retok (4 anak) dan Desa baru yakni Padi Jaya (0 anak).

Kategori BPB mencatat 228 anak, terbagi menurut usia: Usia 7–12 tahun: 62 anak. Usia 13–15 tahun: 54 anak. Usia >15 tahun: 112 anak. Jumlah terbesar berasal dari kelompok usia >15 tahun, menunjukkan ada anak usia produktif yang sama sekali tidak pernah bersekolah. Desa dengan jumlah BPB terbanyak adalah Kuala Mandor B (73 anak) dan Kuala Mandor A (61 anak).



Gambar 3. 4 Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Kuala Mandor B

Kuala Mandor B menjadi desa dengan jumlah ATS tertinggi, yakni 154 anak, dengan dominasi DO dan BPB. Kuala Mandor A menempati posisi kedua dengan 86 anak, di mana BPB menjadi penyumbang terbesar. Padi Jaya adalah desa dengan jumlah ATS paling rendah (0 kasus), karena merupakan desa pemekaran baru terendah berikutnya adalah Desa Retok (56 anak).

3. ATS Kecamatan Sungai Kakap

Jumlah total Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Sungai Kakap adalah 1.505 anak. Angka ini merupakan salah satu yang terbesar jika dibandingkan dengan kecamatan lain. ATS di wilayah ini terdiri dari tiga kategori utama: Drop Out (DO) sebanyak 464 anak, Lulusan Tidak Melanjutkan (LTM) sebanyak 355 anak, dan Belum Pernah Bersekolah (BPB) sebanyak 686 anak.

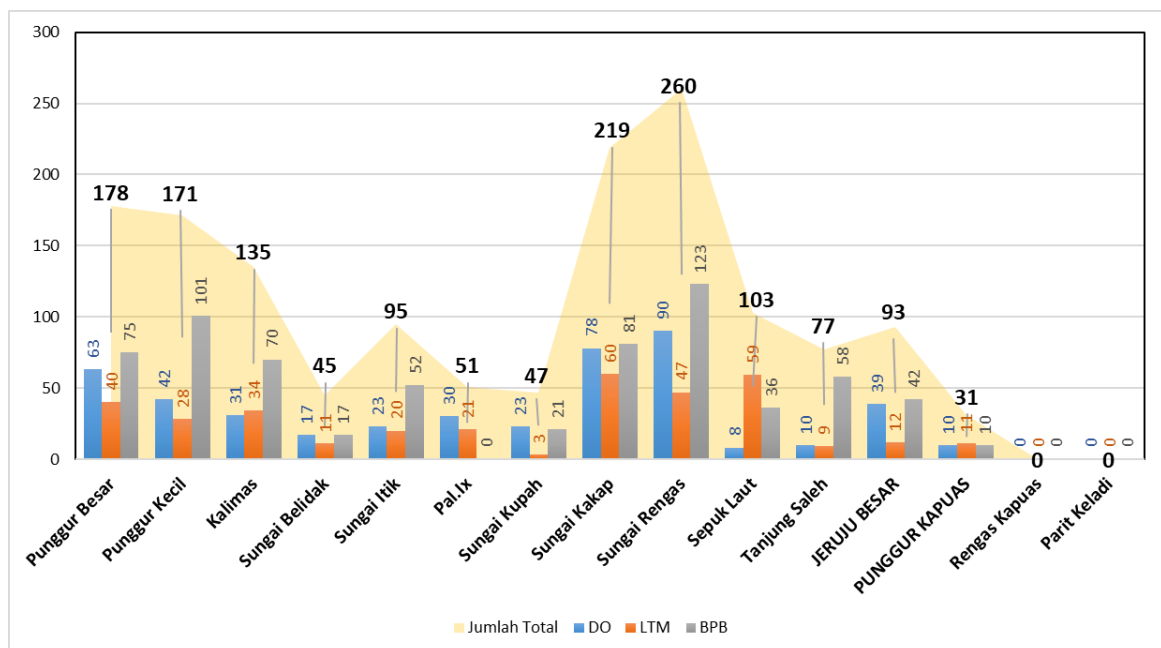
Tabel 3. 4 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Sungai Kakap

No	Desa	PAUD	DO				LTM			BPB					Jumlah Total
			Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	Total	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Total	< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	Total	
1	Punggur Besar	0	13	38	12	63	22	18	40	0	18	25	32	75	178
2	Punggur Kecil	0	8	15	19	42	16	12	28	0	26	13	62	101	171
3	Kalimas	0	7	13	11	31	14	20	34	0	18	12	40	70	135
4	Sungai Belidak	0	7	8	2	17	6	5	11	0	2	5	10	17	45
5	Sungai Itik	0	4	9	10	23	12	8	20	0	11	13	28	52	95
6	Pal.Ix	0	5	8	17	30	7	14	21	0	0	0	0	0	51
7	Sungai Kupah	0	4	0	19	23	2	1	3	0	3	5	13	21	47
8	Sungai Kakap	0	6	34	38	78	41	19	60	0	13	22	46	81	219
9	Sungai Rengas	0	24	25	41	90	10	37	47	0	25	31	67	123	260
10	Sepuk Laut	0	1	3	4	8	9	50	59	0	7	9	20	36	103
11	Tanjung Saleh	0	2	4	4	10	4	5	9	0	19	11	28	58	77
12	JERUJU BESAR	0	3	7	29	39	7	5	12	0	11	9	22	42	93
13	PUNGGUR KAPUAS	0	3	3	4	10	9	2	11	0	5	1	4	10	31
-	Residu	0	89	81	78	248	104	143	247	0	0	0	0	0	495
JUMLAH		-	176	248	288	712	263	339	602	-	158	156	372	686	2,000

Jumlah DO mencapai 464 anak, dengan distribusi: 87 anak di jenjang SD, 167 anak di jenjang SMP, dan 210 anak di jenjang SMA/SMK. Desa dengan jumlah DO tertinggi adalah Sungai Rengas (90 anak), disusul Sungai Kakap (78 anak) dan Punggur Besar (63 anak). Desa dengan DO terendah adalah Parit Keladi (0 anak) dan Rengas Kapuas (0 anak). Pola ini memperlihatkan bahwa DO paling banyak terjadi di jenjang SMA/SMK.

Total LTM adalah 355 anak, dengan rincian 159 lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP, dan 196 lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA/SMK. Desa dengan angka LTM tertinggi adalah Sungai Kakap (60 anak), diikuti Sepuk Laut (59 anak) dan Sungai Rengas (47 anak). Desa yang mencatat LTM terendah adalah Parit Keladi dan Rengas Kapuas yang tidak memiliki kasus LTM. Kondisi ini menandakan transisi dari SMP ke pendidikan menengah atas menjadi titik rawan terbesar di Kecamatan Sungai Kakap.

BPB menjadi kategori dengan jumlah terbesar, yaitu 686 anak. Jika dilihat berdasarkan usia: Usia 7-12 tahun: 158 anak. Usia 13-15 tahun: 156 anak. Usia >15 tahun: 372 anak. Desa dengan BPB tertinggi adalah Sungai Rengas (123 anak), diikuti Punggur Kecil (101 anak) dan Sungai Kakap (81 anak). Beberapa desa mencatat 0 anak BPB, seperti Pal Sembilan, Parit Keladi dan Rengas Kapuas, yang menunjukkan semua anak di desa tersebut minimal pernah bersekolah.



Gambar 3. 5 Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Sungai Kakap

Desa dengan jumlah ATS tertinggi adalah Sungai Rengas (260 anak), disusul Sungai Kakap (219 anak), serta Punggur Besar (178 anak). Desa dengan jumlah ATS terendah dengan catatan 0 kasus anak ATS adalah Parit Keladi dan Rengas Kapuas. Dengan tingginya kategori BPB di Kecamatan Sungai Kakap, dan didominasi usia >15 tahun menunjukkan mayoritas anak yang belum pernah sekolah justru sudah memasuki usia produktif.

4. ATS Kecamatan Teluk Pakedai

Jumlah total ATS di Kecamatan Teluk Pakedai adalah 228 anak. Angka ini mencakup: DO sebanyak 42 anak, LTM sebanyak 85 anak, dan BPB sebanyak 101 anak. Sebaran ATS cukup bervariasi antar desa, dengan beberapa desa menunjukkan angka relatif tinggi sementara desa lain sangat kecil.

Tabel 3. 5 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Teluk Pakedai

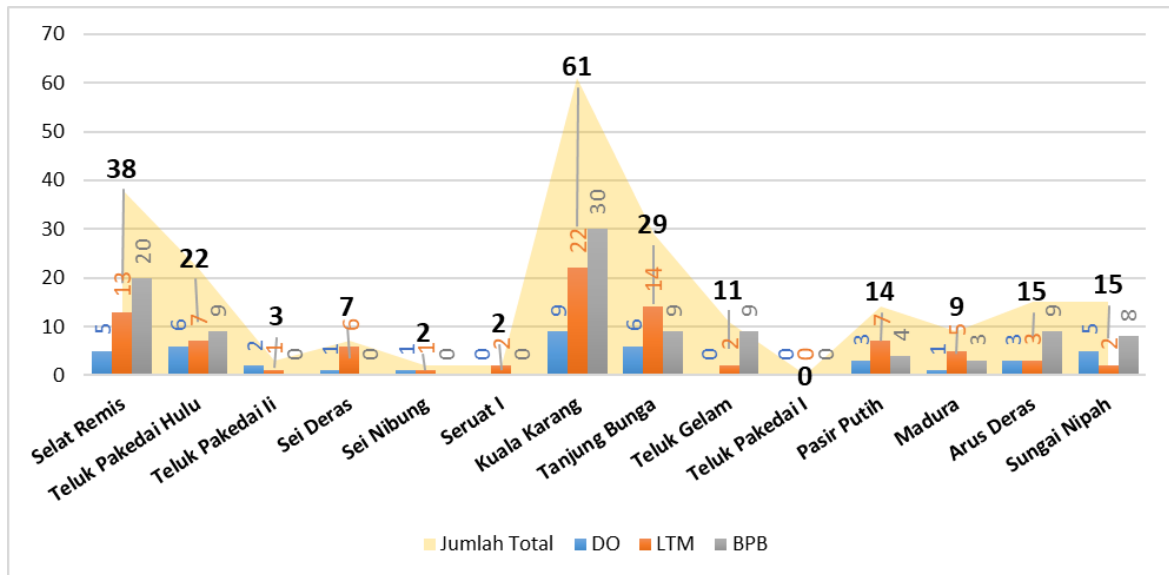
No	Desa	PAUD	DO				LTM			BPB					Jumlah Total
			Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	Total	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Total	< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	Total	
1	Selat Remis	0	4	0	1	5	3	10	13	0	4	4	12	20	38
2	Teluk Pakedai Hulu	0	3	0	3	6	5	2	7	0	0	1	8	9	22
3	Teluk Pakedai Ii	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	3
4	Sei Deras	0	0	0	1	1	1	5	6	0	0	0	0	0	7
5	Sei Nibung	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2
6	Seruati I	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2
7	Kuala Karang	0	2	3	4	9	7	15	22	0	5	3	22	30	61
8	Tanjung Bunga	0	1	3	2	6	5	9	14	0	2	6	1	9	29
9	Teluk Gelam	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	5	9	11
10	Teluk Pakedai I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pasir Putih	0	0	0	3	3	1	6	7	0	2	1	1	4	14
12	Madura	0	0	0	1	1	2	3	5	0	2	0	1	3	9
13	Arus Deras	0	1	0	2	3	2	1	3	0	1	2	6	9	15
14	Sungai Nipah	0	2	1	2	5	1	1	2	0	0	3	5	8	15
-	Residu	0	24	20	13	57	21	49	70	0	0	0	0	0	127
JUMLAH		-	38	27	34	99	53	102	155	-	18	22	61	101	355

Total DO adalah 42 anak, 14 di jenjang SD, 7 di jenjang SMP, dan 21 di jenjang SMA/SMK. Desa dengan jumlah DO tertinggi adalah Kuala Karang (9 anak), diikuti Tanjung Bunga (6 anak) dan Teluk Pakedai Hulu (6 anak). Desa dengan DO terendah dengan tidak mencatatkan kasus DO adalah Seruat Satu, Teluk Gelam, dan Teluk Pakedai Satu.

Total LTM adalah 85 anak, terdiri dari 32 lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP, serta 53 lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK. Desa dengan angka LTM tertinggi adalah Kuala Karang (22 anak) dan Tanjung Bunga (14 anak). Desa dengan angka LTM terendah adalah Teluk Pakedai Satu (0 anak).

Total BPB sejumlah 101 anak. Jika dilihat dari kelompok usia: 7–12 tahun: 18 anak. 13–15 tahun: 22 anak. >15 tahun: 61 anak. Artinya, sebagian besar anak yang belum pernah sekolah sudah berusia di atas 15 tahun, sehingga peluang

masuk ke pendidikan formal semakin kecil dan lebih membutuhkan jalur kesetaraan (Paket A, B, atau C). Desa dengan jumlah BPB tertinggi adalah Kuala Karang (30 anak), disusul Selat Remis (20 anak). Beberapa desa tidak mencatat BPB, seperti Teluk Pakedai Dua, Sungai Deras, Sungai Nibung, Seruat Satu, dan Teluk Pakedai Satu.



Gambar 3. 6 Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Teluk Pakedai

Desa dengan jumlah ATS tertinggi adalah Kuala Karang (61 anak), diikuti Selat Remis (38 anak), dan Tanjung Bunga (29 anak). Desa dengan jumlah ATS paling rendah adalah Teluk Pakedai I dengan tidak mencatatkan kasus anak tidak sekolah. Kasus anak tidak sekolah yang tinggi di Kecamatan Teluk Pakedai ini ditunjukkan oleh desa dengan akses terbatas terhadap fasilitas sekolah. Desa Kuala Karang dengan ATS tertinggi merupakan desa terujung dari Kecamatan Teluk Pakedai yang berhadapan langsung dengan laut, dan sedang diancam abrasi. Akses ke desa juga sangat sulit, sehingga perlu perhatian lebih.

5. ATS Kecamatan Terentang

Jumlah total Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Terentang tercatat sebanyak 136 anak. Angka ini relatif lebih kecil dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Kubu Raya, namun tetap memperlihatkan adanya persoalan akses dan keberlanjutan pendidikan di beberapa desa. ATS terbagi ke dalam DO sebanyak 25 anak, LTM sebanyak 35 anak, dan BPB sebanyak 76 anak.

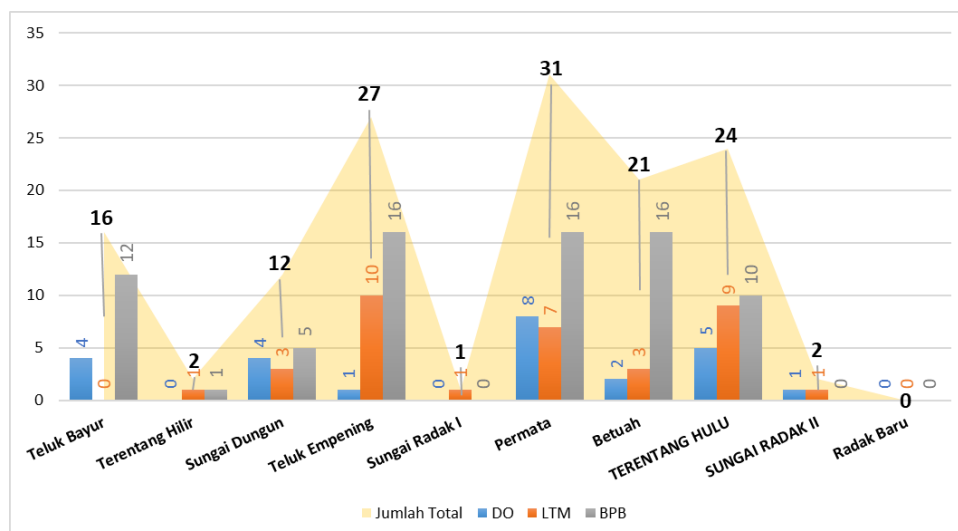
**Tabel 3. 6 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa
Kecamatan Terentang**

No	Desa	PAUD	DO				LTM			BPB					Jumlah Total
			Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	Total	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Total	< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	Total	
1	Teluk Bayur	0	0	3	1	4	0	0	0	0	3	3	6	12	16
2	Terentang Hilir	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	2
3	Sungai Dungun	0	1	2	1	4	1	2	3	0	1	1	3	5	12
4	Teluk Empening	0	0	0	1	1	5	5	10	0	4	1	11	16	27
5	Sungai Radak I	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
6	Permata	0	6	2	0	8	4	3	7	0	1	4	11	16	31
7	Betuah	0	1	0	1	2	0	3	3	0	4	2	10	16	21
8	TERENTANG HULU	0	1	4	0	5	6	3	9	0	2	0	8	10	24
9	SUNGAI RADAK II	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2
-	Residu	0	37	14	10	61	12	30	42	0	0	0	0	0	103
JUMLAH		-	47	25	14	86	31	46	77	-	15	12	49	76	239

Total DO adalah 25 anak, dengan rincian 10 di jenjang SD, 11 di jenjang SMP, dan 4 di jenjang SMA/SMK. Desa dengan jumlah DO tertinggi adalah Desa Permata (8 anak), diikuti oleh Terentang Hulu (5 anak). Sebagian desa mencatat tidak ada angka DO, Terentang Hilir, Sungai Radak I, dan Radak I. Dari data ini menunjukkan bahwa meski jumlah DO tidak terlalu besar, kasus paling banyak muncul di jenjang SMP.

Total LTM mencapai 35 anak, terdiri dari 19 lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP, serta 16 lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK. Desa dengan LTM tertinggi adalah Teluk Empening (10 anak) kemudian Terentang Hulu (9 anak). Desa dengan LTM paling sedikit adalah Teluk Bayur dan Radak Baru dengan nol kasus LTM. Data ini menandakan adanya hambatan untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus, khususnya dari SD ke SMP.

Kategori BPB masih cukup besar, yaitu 76 anak, dengan distribusi usia: Usia 7–12 tahun: 15 anak. Usia 13–15 tahun: 12 anak. Usia >15 tahun: 49 anak. Mayoritas anak yang belum pernah sekolah justru berada di kelompok usia >15 tahun, sehingga semakin sulit dijangkau oleh pendidikan formal reguler. Desa dengan jumlah BPB tertinggi adalah Teluk Empening, Permata, dan Betuah dengan angka seragam sejumlah masing-masing 16 anak (16 anak). Desa Radak Satu, sungai Radak II, dan Radak Baru menunjukkan nol kasus BPB, artinya seluruh anak minimal sudah pernah bersekolah di desa tersebut.



Gambar 3. 7 Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Terentang

Desa dengan jumlah ATS tertinggi adalah Permata (31 anak) dan Teluk Empening (27 anak). Desa dengan jumlah ATS terendah adalah Radak Baru dengan nol kasus ATS.

6. ATS Kecamatan Sungai Raya

Kecamatan Sungai Raya mencatat jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi di Kabupaten Kubu Raya, dengan total 1.996 anak. Angka ini berasal kategori DO sebanyak 526 anak, LTM sebanyak 368 anak, dan BPB sebanyak 1.102 anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sungai Raya merupakan kecamatan dengan beban permasalahan pendidikan terbesar dan memerlukan intervensi khusus.

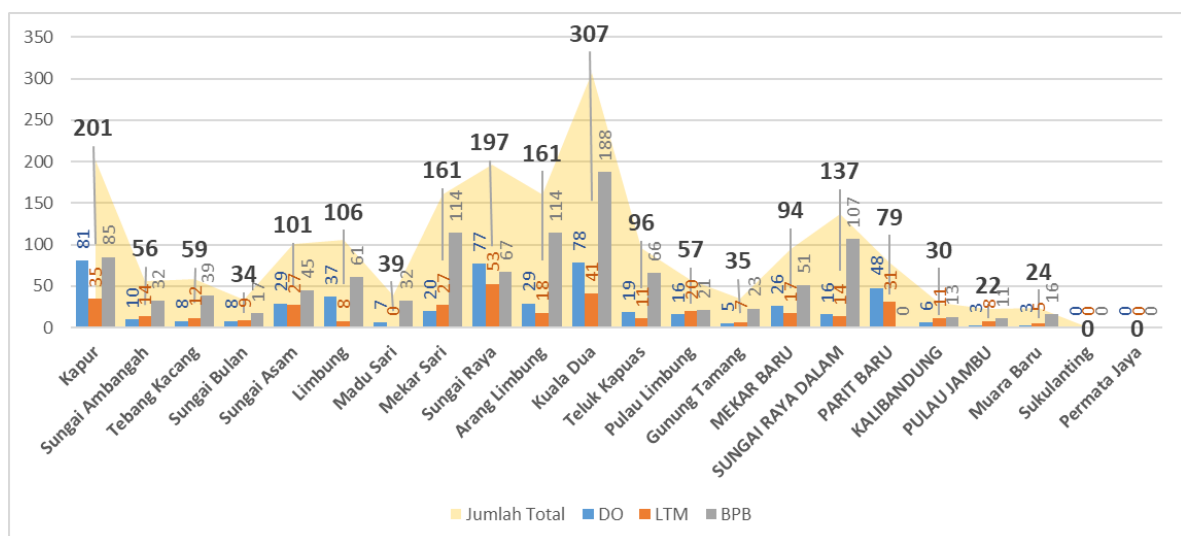
Tabel 3. 7 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Sungai Raya

No	Desa	PAUD	DO				LTM			BPB					Jumlah Total
			Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	Total	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Total	< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	Total	
1	Kapur	0	19	47	15	81	15	20	35	0	23	21	41	85	201
2	Sungai Ambangah	0	6	3	1	10	7	7	14	0	5	4	23	32	56
3	Tebang Kacang	0	3	1	4	8	3	9	12	0	7	13	19	39	59
4	Sungai Bulan	0	1	1	6	8	5	4	9	0	5	5	7	17	34
5	Sungai Asam	0	8	15	6	29	11	16	27	0	9	13	23	45	101
6	Limbang	0	2	10	25	37	2	6	8	0	8	18	35	61	106
7	Madu Sari	0	1	2	4	7	0	0	0	0	9	6	17	32	39
8	Mekar Sari	0	8	3	9	20	12	15	27	0	18	32	64	114	161
9	Sungai Raya	0	19	17	41	77	12	41	53	0	13	28	26	67	197
10	Arang Limbung	0	7	8	14	29	7	11	18	0	23	34	57	114	161
11	Kuala Dua	0	23	23	32	78	5	36	41	0	45	40	103	188	307
12	Teluk Kapuas	0	6	3	10	19	5	6	11	0	22	12	32	66	96
13	Pulau Limbung	0	9	4	3	16	13	7	20	0	6	5	10	21	57
14	Gunung Tamang	0	3	1	1	5	5	2	7	0	2	7	14	23	35
15	MEKAR BARU	0	14	6	6	26	7	10	17	0	19	11	21	51	94
16	SUNGAI RAYA DALAM	0	9	1	6	16	8	6	14	0	32	25	50	107	137
17	PARIT BARU	0	13	6	29	48	9	22	31	0	0	0	0	0	79
18	KALIBANDUNG	0	4	2	0	6	3	8	11	0	2	5	6	13	30
19	PULAU JAMBU	0	0	3	0	3	6	2	8	0	1	5	5	11	22
20	Muara Baru	0	0	3	0	3	2	3	5	0	1	5	10	16	24
-	Residu	0	129	83	76	288	60	144	204	0	0	0	0	0	492
JUMLAH		-	284	242	288	814	197	375	572	-	250	289	563	1.102	2.488

Jumlah total kasus DO sebanyak 526 anak, dengan distribusi 155 di jenjang SD, 159 di jenjang SMP, dan 212 di jenjang SMA/SMK. Desa dengan DO tertinggi adalah Kapur (81 anak), disusul Kuala Dua (78 anak), dan Sungai Raya (77 anak). Desa dengan angka DO terendah adalah Permata Jaya dan Sukalanting (masing-masing 0 anak) karena merupakan desa pemekaran baru. Dari data ini menunjukkan bahwa masalah putus sekolah lebih dominan di tingkat menengah atas (SMA/SMK).

Total LTM sejumlah 368 anak, terdiri dari 137 lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP, dan 231 lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK. Desa dengan LTM tertinggi adalah Sungai Raya (53 anak), kemudian Kuala Dua (41 anak). Desa dengan LTM terendah adalah Madu Sari (0 anak), selaras dengan data LTM di Suku lanting dan Permata Jaya yang merupakan desa pemekaran baru. Dari data dapat terlihat, banyak anak berhasil menyelesaikan pendidikan dasar, tetapi berhenti di jenjang menengah.

BPB merupakan kategori dengan jumlah terbesar, mencapai 1.102 anak. Jika dilihat berdasarkan kelompok usia: 7–12 tahun: 250 anak. 13–15 tahun: 289 anak. >15 tahun: 563 anak. Artinya, lebih dari separuh anak di Kecamatan Sungai Raya yang belum pernah sekolah sudah berusia di atas 15 tahun, sehingga mereka sulit kembali ke jalur sekolah formal dan membutuhkan program kesetaraan. Desa dengan jumlah BPB tertinggi adalah Kuala Dua (188 anak), Arang Limbung dan Mekar Sari (masing-masing 114 anak). Desa yang mencatat 0 anak BPB adalah Parit Baru, Sukalanting, dan Permata Jaya.



Gambar 3. 8 Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Sungai Raya

Desa dengan ATS tertinggi adalah Kuala Dua (307 anak), disusul Kapur (201 anak), Sungai Raya (197 anak), dan Arang Limbung (161 anak). Desa dengan ATS terendah adalah Permata Jaya dan Sukalanting (masing-masing di bawah 0 anak). Hal ini menunjukkan bahwa beban masalah pendidikan di Sungai Raya terkonsentrasi pada beberapa desa besar yang padat penduduk.

7. ATS Kecamatan Batu Ampar

Jumlah total Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Batu Ampar mencapai 459 anak. Angka ini terbagi dalam kasus DO sebanyak 89 anak, jumlah kasus LTM sebanyak 113 anak, dan kasus BPB sebanyak 257 anak. Data menunjukkan bahwa ATS tersebar di 15 desa, dengan variasi jumlah yang cukup signifikan antar desa.

Tabel 3. 8 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Batu Ampar

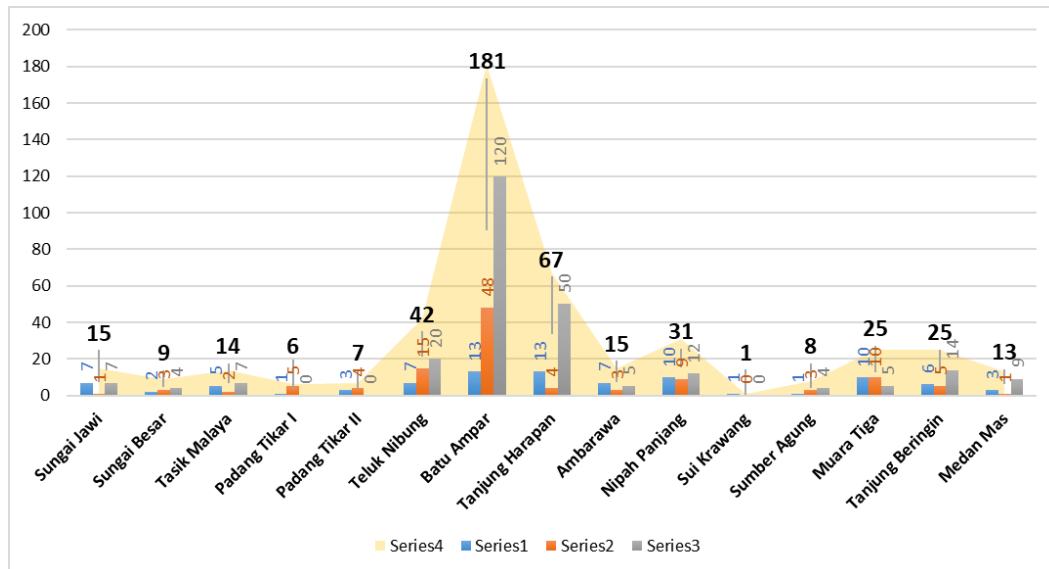
No	Desa	PAUD	DO				LTM			BPB					Jumlah Total
			Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	Total	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Total	< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	Total	
1	Sungai Jawi	0	0	5	2	7	0	1	1	0	3	2	2	7	15
2	Sungai Besar	0	1	0	1	2	3	0	3	0	0	0	4	4	9
3	Tasik Malaya	0	1	0	4	5	1	1	2	0	2	0	5	7	14
4	Padang Tikar I	0	0	0	1	1	3	2	5	0	0	0	0	0	6
5	Padang Tikar II	0	2	0	1	3	3	1	4	0	0	0	0	0	7
6	Teluk Nibung	0	2	4	1	7	3	12	15	0	3	6	11	20	42
7	Batu Ampar	0	7	5	1	13	22	26	48	0	24	34	62	120	181
8	Tanjung Harapan	0	5	7	1	13	1	3	4	0	12	12	26	50	67
9	Ambarawa	0	2	2	3	7	0	3	3	0	1	2	2	5	15
10	Nipah Panjang	0	6	4	0	10	6	3	9	0	1	4	7	12	31
11	Sui Krawang	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Sumber Agung	0	1	0	0	1	0	3	3	0	1	1	2	4	8
13	Muara Tiga	0	3	2	5	10	5	5	10	0	0	1	4	5	25
14	Tanjung Beringin	0	0	5	1	6	1	4	5	0	3	4	7	14	25
15	Medan Mas	0	0	1	2	3	1	0	1	0	2	3	4	9	13
-	Residu	0	29	50	42	121	34	60	94	0	0	0	0	0	215
JUMLAH		-	59	86	65	210	83	124	207	-	52	69	136	257	674

Data ATS Kecamatan Batu Ampar merincikan DO sejumlah 89 anak, dengan distribusi 30 anak di jenjang SD, 36 anak di jenjang SMP, dan 23 anak di jenjang SMA/SMK. Desa dengan DO tertinggi adalah Batu Ampar (13 anak), disusul Tanjung Harapan (13 anak). Beberapa desa mencatat angka DO terendah dengan jumlah kasus 1 anak, seperti Padang Tikar I, Sungai Krawang, dan Sumber Agung. Hal ini memperlihatkan bahwa risiko putus sekolah relatif merata.

Total LTM sejumlah 113 anak, terdiri dari 49 lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP, serta 64 lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK. Desa dengan angka LTM tertinggi adalah Batu Ampar (48 anak), kemudian Teluk Nibung (15 anak). Desa dengan LTM terendah adalah Sungai Kerawang yang mencatatkan 0 kasus LTM.

Total BPB sejumlah 257 anak, dengan rincian: Usia 7–12 tahun: 52 anak. Usia 13–15 tahun: 69 anak. Usia >15 tahun: 136 anak. Artinya, mayoritas

anak yang belum pernah bersekolah sudah berada di kelompok usia >15 tahun. Desa dengan BPB tertinggi adalah Batu Ampar (120 anak), diikuti Tanjung Harapan (50 anak). Beberapa desa mencatat jumlah BPB dengan nol kasus, seperti Padang Tikar Satu, Padang Tikar Dua, dan Sungai Kerawang.



Gambar 3. 9 Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Batu Ampar

Desa dengan ATS tertinggi adalah Batu Ampar (181 anak), menjadi penyumbang hampir 40% dari total ATS kecamatan. Desa berikutnya adalah Tanjung Harapan (67 anak) dan Teluk Nibung (42 anak). Desa dengan jumlah ATS terendah adalah Sui Krawang (1 anak) dan Padang Tikar I (6 anak). Sebaran ini menegaskan bahwa Batu Ampar merupakan desa prioritas intervensi diantara desa lainnya karena memiliki permasalahan paling besar dibanding desa lainnya.

8. ATS Kecamatan Kubu

Jumlah total Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Kubu tercatat sebanyak 397 anak. Angka ini terbagi ke dalam DO sebanyak 92 anak, LTM sebanyak 116 anak, dan BPB sebanyak 189 anak. Jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Kubu Raya, angka ini tergolong menengah: tidak setinggi Sungai Raya atau Sungai Kakap, tetapi tetap signifikan dan perlu perhatian.

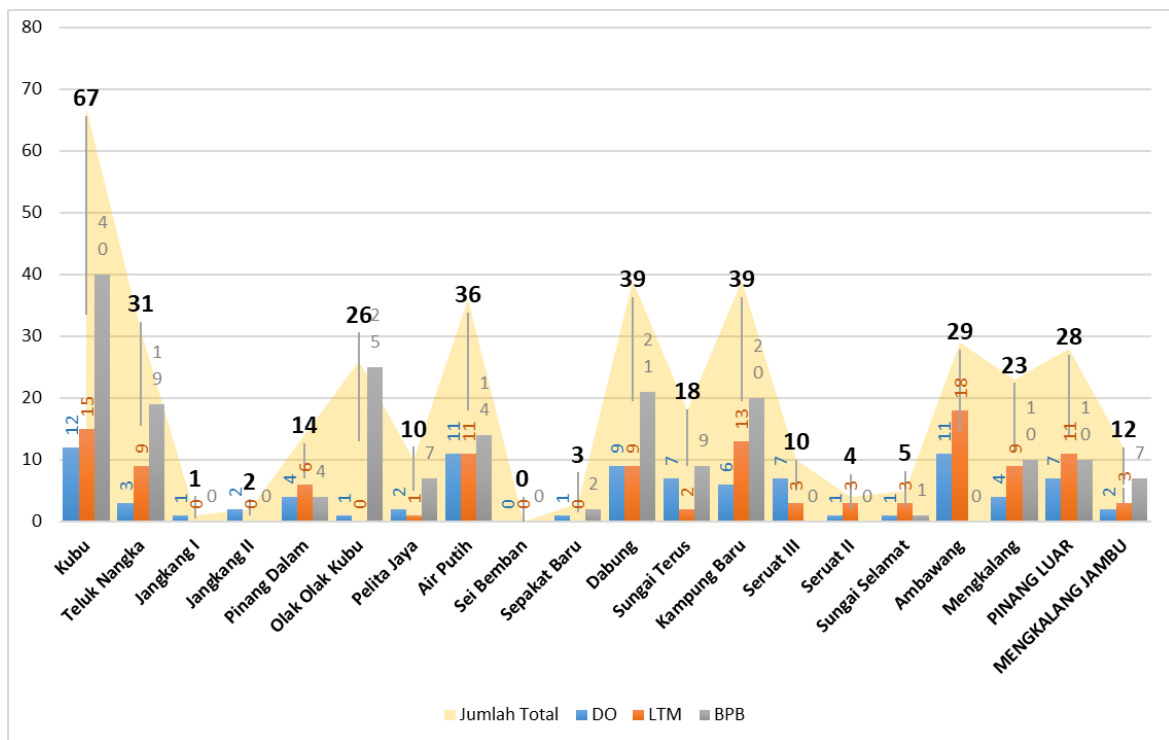
**Tabel 3. 9 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa
Kecamatan Kubu**

No	Desa	PAUD	DO				LTM			BPB					Jumlah Total
			Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	Total	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Total	< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	Total	
1	Kubu	0	4	3	5	12	5	10	15	0	10	5	25	40	67
2	Teluk Nangka	0	0	1	2	3	5	4	9	0	6	4	9	19	31
3	Jangkang I	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	Jangkang II	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	Pinang Dalam	0	0	0	4	4	0	6	6	0	1	2	1	4	14
6	Olak Olak Kubu	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	6	14	25	26
7	Pelita Jaya	0	1	1	0	2	1	0	1	0	1	2	4	7	10
8	Air Putih	0	0	4	7	11	10	1	11	0	4	5	5	14	36
9	Sei Bemban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sepakat Baru	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	3
11	Dabung	0	1	4	4	9	2	7	9	0	7	11	3	21	39
12	Sungai Terus	0	1	6	0	7	0	2	2	0	4	2	3	9	18
13	Kampung Baru	0	1	4	1	6	10	3	13	0	9	2	9	20	39
14	Seruati III	0	7	0	0	7	3	0	3	0	0	0	0	0	10
15	Seruati II	0	0	0	1	1	1	2	3	0	0	0	0	0	4
16	Sungai Selamat	0	1	0	0	1	2	1	3	0	1	0	0	1	5
17	Ambawang	0	1	4	6	11	10	8	18	0	0	0	0	0	29
18	Mengkalang	0	3	0	1	4	3	6	9	0	3	3	4	10	23
19	PINANG LUAR	0	0	1	6	7	1	10	11	0	1	3	6	10	28
20	MENGKALANG JAMBU	0	0	1	1	2	0	3	3	0	1	2	4	7	12
-	Residu	0	48	35	30	113	64	65	129	0	0	0	0	0	242
JUMLAH		-	69	66	70	205	117	128	245	-	53	48	88	189	639

Jumlah DO mencapai 92 anak, dengan rincian 21 anak di jenjang SD, 31 anak di jenjang SMP, dan 40 anak di jenjang SMA/SMK. Desa dengan angka DO tertinggi adalah Kubu (12 Anak). Desa dengan catatan kasus DO nol anak dipegang oleh Desa Sungai Bemban.

Total LTM adalah 116 anak, terdiri dari 53 lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP, serta 63 lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK. Desa dengan LTM tertinggi adalah Ambawang (18 anak), selanjutnya Kubu (15 anak). Terdapat beberapa desa yang tidak mencatatkan kasus untuk LTM diantaranya Desa Jangkang Satu, Jangkang Dua, Olak-olak Kubu, Sungai Bemban dan Sepakat Baru.

Total BPB mencapai 189 anak, dengan distribusi usia: 7–12 tahun: 53 anak. 13–15 tahun: 48 anak. >15 tahun: 88 anak. Mayoritas anak yang belum pernah bersekolah berada di kelompok usia >15 tahun, artinya dibutuhkan peran sekolah kesetaraan untuk menurunkan angka ini. Desa dengan jumlah BPB tertinggi adalah Kubu (40 anak), dan Olak-Olak Kubu (25 anak). Beberapa desa mencatat jumlah BPB 0 anak, seperti Jangkang Satu, Jangkang Dua, Sei Bemban, Seruat Tiga, Seruat Dua, dan Ambawang.



Gambar 3. 10 Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Kubu

Desa dengan ATS tertinggi adalah Kubu (67 anak), disusul Dabung dan Air Putih (masing-masing 39 anak). Desa dengan ATS terendah adalah Sungai Bemban (nol anak), Jangkang satu (1 anak), Jangkang II (2 anak), Seruat II (4 anak), serta Mengkalang Jambu (12 anak).

9. ATS Kecamatan Rasau Jaya

Jumlah total Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Rasau Jaya adalah 145 anak. Angka ini terdiri atas DO sebanyak 32 anak, LTM sebanyak 50 anak, dan BPB sebanyak 63 anak.

Tabel 3. 10 Data ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Rasau Jaya

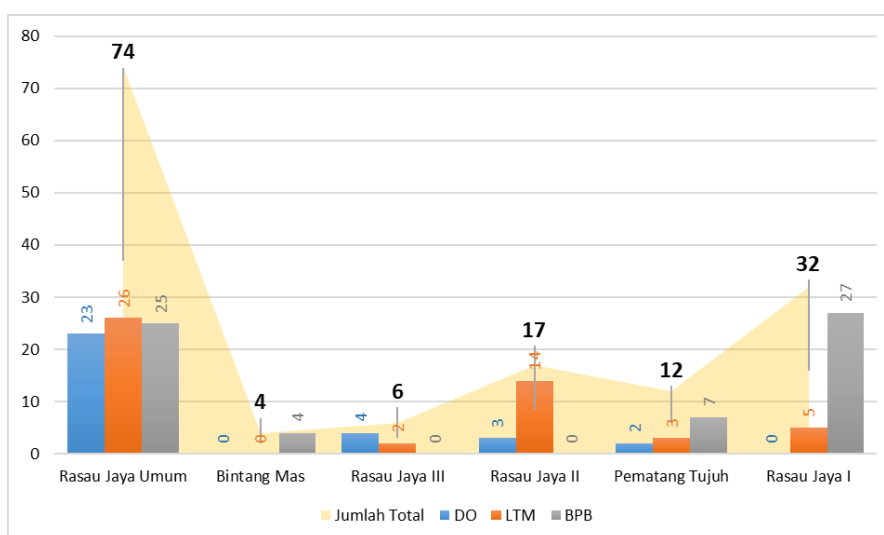
No	Desa	PAUD	DO				LTM			BPB					Jumlah Total
			Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	Total	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Total	< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	Total	
1	Rasau Jaya Umum	0	9	7	7	23	12	14	26	0	4	6	15	25	74
2	Bintang Mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4
3	Rasau Jaya III	0	0	2	2	4	0	2	2	0	0	0	0	0	6
4	Rasau Jaya II	0	1	0	2	3	1	13	14	0	0	0	0	0	17
5	Pematang Tujuh	0	2	0	0	2	1	2	3	0	1	1	5	7	12
6	Rasau Jaya I	0	0	0	0	0	5	0	5	0	7	6	14	27	32
-	Residu	0	12	18	17	47	15	51	66	0	0	0	0	0	113
JUMLAH		-	24	27	28	79	34	82	116	-	12	15	36	63	258

Total DO sebanyak 32 anak, terdiri dari 12 anak SD, 9 anak SMP, dan 11 anak SMA/SMK. Desa dengan DO tertinggi adalah Rasau Jaya Umum (23 anak). Desa Bintang Mas dan Rasau Jaya Satu tidak mencatat kasus DO, menunjukkan

capaian pendidikan yang relatif baik. Kasus DO paling banyak terjadi di jenjang SMA/SMK.

Jumlah LTM sebanyak 50 anak, terdiri dari 19 lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP, dan 31 lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA/SMK. Desa dengan LTM tertinggi adalah Rasau Jaya Umum (26 anak), disusul Rasau Jaya II (14 anak). Desa Bintang Mas mencatatkan nol kasus LTM dan Rasau Jaya III mencatat 2 anak LTM, ini jumlah terendah dari seluruh desadi Rasau Jaya.

Total BPB sejumlah 63 anak, dengan distribusi usia: 7–12 tahun: 12 anak. 13–15 tahun: 15 anak. >15 tahun: 36 anak. Mayoritas anak BPB sudah berada pada kelompok usia >15 tahun, sehingga membutuhkan pendidikan kesetaraan. Desa dengan BPB tertinggi adalah Rasau Jaya satu (27 anak) dan Rasau Jaya Umum (25 anak). Desa dengan nol kasus BPB diantaranya Rasau Jaya Dua dan Rasau Jaya Tiga.



Gambar 3. 11 Distribusi ATS Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik Per Desa Kecamatan Rasau Jaya

Desa dengan ATS tertinggi adalah Rasau Jaya Umum (74 anak), menyumbang hampir setengah dari total ATS kecamatan. Desa berikutnya adalah Rasau Jaya I (32 anak) dan Rasau Jaya II (17 anak). Desa dengan ATS terendah adalah Bintang Mas (4 anak) dan Rasau Jaya III (6 anak).

3.3 Identifikasi Kelompok ATS berdasarkan Penyebab

Dari jumlah ATS tersebut baru sekitar (...%) yang sudah diverifikasi baik itu oleh Operator Dapodik maupun Operator EMIS (untuk DO dan LTM), sedangkan untuk BPB belum diverifikasi karena belum ada penunjukan untuk

operator pada setiap desa. Adapun alasan utama yang sering muncul pada setiap kecamatan adalah anak tidak mau sekolah, anak bekerja/ pekerja anak, anak dalam pernikahan, sudah cukup dengan tingkat pendidikan saat ini, tidak ada biaya, dan anak penyandang disabilitas. Secara lebih terinci dapat dilihat sebagai berikut:

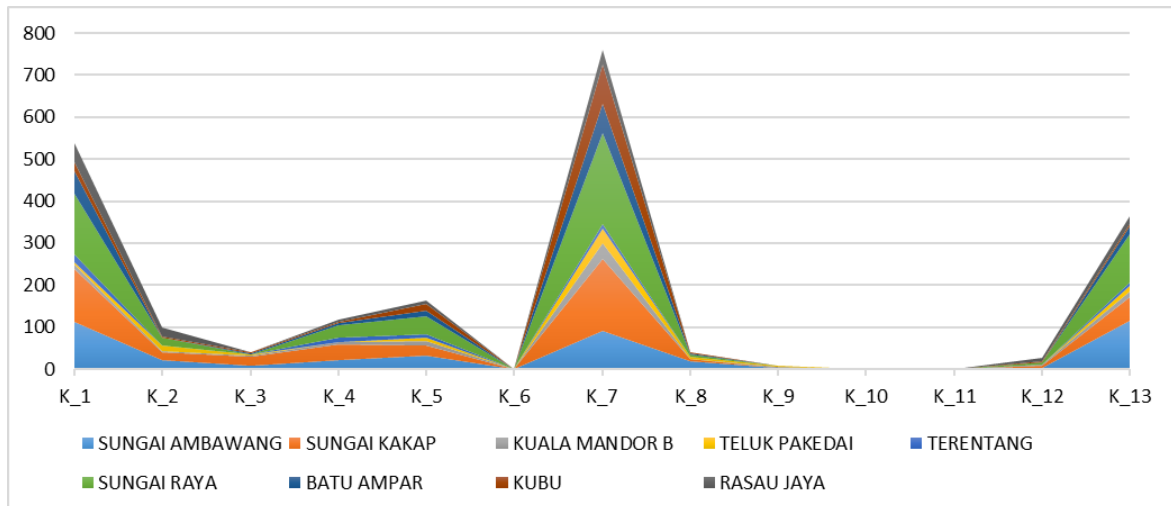
Tabel 3. 11 Identifikasi ATS berdasarkan alasan tidak sekolah

NO	KECAMATAN	TOTAL ATS TAHUN 2025 (TERVERIFIKASI)	ALASAN TIDAK SEKOLAH & SEBARAN JUMLAH ATS	
1	SUNGAI AMBAWANG	464	k_1. Tidak mau bersekolah	112
			k_2. Tidak ada biaya	22
			k_3. Sekolah jauh dari rumah	8
			k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini	21
			k_5. Menikah / mengurus rumah tangga	31
			k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah	0
			k_7. Bekerja	92
			k_8. Pengaruh lingkungan/teman	20
			k_9. Beranggapan sekolah tidak penting	4
			k_10. Tidak memiliki seragam sekolah	0
			k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran	0
			k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas	4
			k_13. Lainnya	116
2	SUNGAI KAKAP	505	k_1. Tidak mau bersekolah	126
			k_2. Tidak ada biaya	19
			k_3. Sekolah jauh dari rumah	22
			k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini	39
			k_5. Menikah / mengurus rumah tangga	24
			k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah	0
			k_7. Bekerja	170
			k_8. Pengaruh lingkungan/teman	4
			k_9. Beranggapan sekolah tidak penting	0
			k_10. Tidak memiliki seragam sekolah	0
			k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran	0
			k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas	4
			k_13. Lainnya	55
3	KUALA MANDOR B	92	k_1. Tidak mau bersekolah	11
			k_2. Tidak ada biaya	2
			k_3. Sekolah jauh dari rumah	2
			k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini	4

			k_5. Menikah / mengurus rumah tangga	13
			k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah	0
			k_7. Bekerja	37
			k_8. Pengaruh lingkungan/teman	0
			k_9. Beranggapan sekolah tidak penting	1
			k_10. Tidak memiliki seragam sekolah	0
			k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran	0
			k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas	3
			k_13. Lainnya	13
4	TELUK PAKEDAI	90	k_1. Tidak mau bersekolah	6
			k_2. Tidak ada biaya	12
			k_3. Sekolah jauh dari rumah	2
			k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini	1
			k_5. Menikah / mengurus rumah tangga	6
			k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah	0
			k_7. Bekerja	36
			k_8. Pengaruh lingkungan/teman	5
			k_9. Beranggapan sekolah tidak penting	2
			k_10. Tidak memiliki seragam sekolah	0
			k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran	0
			k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas	0
			k_13. Lainnya	15
5	TERENTANG	57	k_1. Tidak mau bersekolah	18
			k_2. Tidak ada biaya	0
			k_3. Sekolah jauh dari rumah	0
			k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini	9
			k_5. Menikah / mengurus rumah tangga	8
			k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah	0
			k_7. Bekerja	11
			k_8. Pengaruh lingkungan/teman	0
			k_9. Beranggapan sekolah tidak penting	0
			k_10. Tidak memiliki seragam sekolah	1
			k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran	0
			k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas	0
			k_13. Lainnya	6
6	SUNGAI RAYA	662	k_1. Tidak mau bersekolah	144
			k_2. Tidak ada biaya	20
			k_3. Sekolah jauh dari rumah	2
			k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini	30
			k_5. Menikah / mengurus rumah tangga	44

			k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah	0
			k_7. Bekerja	215
			k_8. Pengaruh lingkungan/teman	7
			k_9. Beranggapan sekolah tidak penting	2
			k_10. Tidak memiliki seragam sekolah	0
			k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran	0
			k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas	4
			k_13. Lainnya	117
7	BATU AMPAR	167	k_1. Tidak mau bersekolah	54
			k_2. Tidak ada biaya	1
			k_3. Sekolah jauh dari rumah	1
			k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini	6
			k_5. Menikah / mengurus rumah tangga	13
			k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah	0
			k_7. Bekerja	70
			k_8. Pengaruh lingkungan/teman	1
			k_9. Beranggapan sekolah tidak penting	0
			k_10. Tidak memiliki seragam sekolah	0
			k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran	0
			k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas	1
			k_13. Lainnya	19
8	KUBU	156	k_1. Tidak mau bersekolah	21
			k_2. Tidak ada biaya	3
			k_3. Sekolah jauh dari rumah	2
			k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini	3
			k_5. Menikah / mengurus rumah tangga	16
			k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah	0
			k_7. Bekerja	95
			k_8. Pengaruh lingkungan/teman	2
			k_9. Beranggapan sekolah tidak penting	0
			k_10. Tidak memiliki seragam sekolah	0
			k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran	0
			k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas	3
			k_13. Lainnya	5
9	RASAU JAYA	143	k_1. Tidak mau bersekolah	45
			k_2. Tidak ada biaya	19
			k_3. Sekolah jauh dari rumah	1
			k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini	4
			k_5. Menikah / mengurus rumah tangga	8
			k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma	0

			di sekolah	
			k_7. Bekerja	33
			k_8. Pengaruh lingkungan/teman	2
			k_9. Beranggapan sekolah tidak penting	0
			k_10. Tidak memiliki seragam sekolah	0
			k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran	0
			k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas	9
			k_13. Lainnya	17



Gambar 3. 12 Grafik Identifikasi ATS berdasarkan alasan tidak sekolah

Dari data kelompok ATS berdasarkan alasan tidak sekolah yang terdapat pada dasbor Verifikasi Validasi Anak Tidak Sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 5 alasan yang paling sering muncul diantaranya:

1. Bekerja
2. Tidak mau bersekolah
3. Lainnya
4. Menikah / mengurus rumah tangga
5. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini

Dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang paling sering muncul tersebut di atas, kemudian diintegrasikan dengan sasaran penerima manfaat menurut Stranas ATS, maka kelompok ATS prioritas intervensi yang disepakati adalah:

1. Anak yang bekerja dan pekerja anak
2. Kelompok ATS lainnya
3. Anak dalam pernikahan anak / ibu remaja

3.4 Analisa Isu ATS

Berdasarkan hasil perhitungan data, kelompok prioritas intervensi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang disepakati meliputi: (1) anak yang bekerja atau pekerja anak, (2) kelompok ATS lainnya, dan (3) anak dalam pernikahan anak atau ibu remaja. Namun demikian, dalam konteks Kabupaten Kubu Raya terdapat pertimbangan tambahan yang perlu dimasukkan. Data menunjukkan bahwa jumlah anak penyandang disabilitas relatif tinggi dan menuntut perhatian khusus. Meskipun hingga saat ini data terkait keberadaan dan kondisi anak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terverifikasi, keberadaan mereka secara nyata menimbulkan urgensi untuk dimasukkan ke dalam kelompok prioritas intervensi. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusivitas dalam Strategi Nasional Penanganan ATS yang menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak dengan keterbatasan fisik maupun mental, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, layanan pendidikan, serta akses terhadap program pembangunan sosial. Dengan demikian, anak penyandang disabilitas dipandang relevan untuk ditambahkan sebagai kelompok prioritas dalam intervensi kebijakan di Kabupaten Kubu Raya.

Analisa isu ATS dilakukan terhadap 5 Isu utama anak tidak sekolah di Kabupaten Kubu Raya, yang dikategorikan dalam 4 kelompok ATS berdasarkan Stranas PATS, yaitu:

1. Anak yang bekerja/ pekerja anak
2. Anak penyandang disabilitas
3. Anak dalam pernikahan
4. Kelompok ATS lainnya:
 - a. Tidak mau sekolah/ kurang motivasi
 - b. Tidak ada biaya

Setelah dilakukan analisis terhadap isu-isu tersebut, dicari akar permasalahan dan tantangannya sehingga dapat dirumuskan rencana aksi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dan akar masalahnya.

Tabel 3. 12
Analisa Isu ATS Anak yang bekerja/ pekerja anak

No	Akar Permasalahan	Tantangan	Strategi	Rencana Aksi	Instansi Pj
1	Tingginya beban ekonomi keluarga	Belum optimalnya sinergitas antara program peningkatan ekonomi keluarga dengan penanganan ATS,	Mengurangi angka pekerja anak melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan keluarga	Peningkatan ekonomi keluarga berbasis ATS	Disbunak Diskan DKUMPP
				Pemberian bantuan sosial/PKH/Beasiswa	Dinsos
				Pengembangan pendidikan vokasional dan life skill bagi ATS	Disdikbud (PKBM) Distranaker
2	Belum adanya data pekerja anak yang terverifikasi	Isu pekerja anak belum dianggap sebagai masalah yang serius		Pendataan Pekerja Anak	DP3KB DPMD Distranaker

Tabel 3. 13
Analisa Isu ATS Anak Penyandang Disabilitas

No	Akar Permasalahan	Tantangan	Strategi	Rencana Aksi	Instansi Pj
1	Keterbatasan aksesibilitas ABK menjangkau fasilitas pendidikan yang ada	Terbatasnya fasilitas pendidikan untuk anak penyandang disabilitas (khusus maupun inklusi)	Meningkatkan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas	Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan SLB atau sekolah inklusif, serta layanan pendidikan alternatifnya (non formal) untuk semua anak penyandang disabilitas	Disdikbud Dinsos
		Tenaga pendidik belum ramah disabilitas		Memperkuat kapasitas sekolah umum yang menerapkan pendidikan inklusif untuk melayani anak penyandang disabilitas	Disdikbud
				Pemberian alat bantu dan bantuan pendidikan / beasiswa kepada ABK dari keluarga kurang mampu	Dinsos
				Fasilitasi gedung sekolah yang aksesibel dan inklusif	Disdikbud
		Tenaga pendidik belum ramah disabilitas		Pelatihan Berjenjang Pendidikan Inklusif	Disdikbud
2	Kurangnya motivasi keluarga / orang tua untuk mendorong ABK Bersekolah	Stigma sosial, orang tua ABK takut dikucilkan atau merasa malu		Edukasi dan Pemberdayaan Orang Tua	Dinsos DP3KB
3	Belum adanya data anak disabilitas yang terverifikasi			Pendataan anak disabilitas	Dinsos DP3KB DPMD

Tabel 3. 14
Analisa Isu ATS Anak dalam pernikahan

No	Akar Permasalahan	Tantangan	Strategi	Rencana Aksi	Instansi Pj
1	Tingginya Perkawinan usia anak	Rendahnya pemahaman orang tua tentang risiko pernikahan anak	Mencegah perkawinan anak dan memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi	Sosialisasi dan advokasi pencegahan perkawinan anak	DP3KB Disdikbud Diskominfo
		Pergaulan Bebas		Reintegrasi anak menikah ke pendidikan formal maupun informal	DP3KB Disdikbud Diskominfo
		Norma adat/agama yang mentolerir menikah usia anak		Penguatan Regulas	DP3KB Disdikbud

Tabel 3. 15
Analisa Isu ATS Kelompok ATS lainnya (Tidak mau sekolah/ kurang motivasi)

1

No	Akar Permasalahan	Tantangan	Strategi	Rencana Aksi	Instansi Pj
1.	Rendahnya minat belajar (sekolah dianggap tidak penting)	Kesadaran masyarakat masih rendah tentang pentingnya pendidikan	Meningkatkan motivasi dan minat belajar anak melalui pendidikan yang menarik dan fleksibel	Penguatan Tim P-ATS Koordinasi dan Sinkronisasi	Bappedalitbang Tim ATS
				Advokasi dan kampanye sosial penanganan ATS	Disdikbud Dinsos DP3KB DPMD Disdukcapil Kemenag Kec dan Desa Diskominfo
2.	Keterbatasan akses	Akses pendidikan belum merata		○ Revitalisasi Satuan Pendidikan ○ Pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar ○ Pengembangan PKBM	Kemendik Disdikbud prov Disdikbud kab Kemenag
		Akses ke sarana pendidikan belum optimal		○ Peningkatan/rehabilitasi jalan dan jembatan ○ Pembangunan dermaga	DPUPRPRKP Dishub

Tabel 3. 16
Analisa Isu ATS Kelompok ATS lainnya (Tidak ada biaya)

No	Akar Permasalahan	Tantangan	Strategi	Rencana Aksi	Instansi Pj
1	Keterbatasan ekonomi keluarga	Kuota penerima bantuan terbatas	Memperluas akses pendidikan melalui jaminan pembiayaan sekolah	Harmonisasi data penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Dinsos Disdikbud Kemenag Kecamatan/Desa Dunia Usaha
2	Tingginya biaya personal (biaya transport ke sekolah, biaya pembelian seragam, uang jajan dll) untuk menyekolahkan anak	Belum semua keluarga miskin yang memiliki ATS mendapatkan bantuan sosial ataupun bantuan siswa miskin		Pendampingan keluarga miskin yang memiliki ATS untuk memperoleh bantuan sosial dan atau bantuan siswa miskin (PIP, PKH, BSM)	

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH

Stranas P-ATS yang telah disusun oleh Bappenas mengedepankan strategi intervensi dan strategi pencegahan. Strategi intervensi ditujukan kepada anak-anak dan remaja yang tidak bersekolah, sedangkan strategi pencegahan diarahkan untuk memastikan agar anak yang beresiko putus sekolah tetap bersekolah sampai tuntas Pendidikan Dasar dan Menengah 12 Tahun.

Strategi intervensi ditujukan kepada anak yang saat ini tidak bersekolah atau berada di luar sistem pendidikan baik formal maupun nonformal. Strategi intervensi bertujuan untuk menjangkau, mendaftarkan, mengembalikan dan mendampingi ATS ke dalam program pendidikan dan pelatihan yang relevan. Proses pendampingan ATS yang ingin kembali bersekolah, misalnya melalui program retrieval yang dulu pernah dilakukan oleh Kementerian dengan Pemerintah Daerah yaitu melalui Kegiatan Peningkatan Jaminan Kepastian Layanan Sekolah, sangat diperlukan untuk memastikan agar ATS dapat melalui proses transisinya dengan baik dan dapat beradaptasi dengan proses pembelajaran yang akan diikuti.

Berdasarkan hasil analisa isu pada setiap kelompok ATS, selanjutnya disusun matriks rencana aksi dengan memasukkan program, kegiatan dan subkegiatan yang sesuai. Matriks yang disusun telah melalui tahapan FGD dan konsultasi publik dengan nomenklatur disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Seluruh rencana kebijakan dan aksi prioritas penanganan ATS yang diidentifikasi diharapkan dapat diadopsi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Matriks penanganan ATS yang ditampilkan disusun berdasarkan isu ATS sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Matriks Penanganan ATS Untuk Isu Anak Bekerja/ Pekerja Anak

Strategi 1 : Mengurangi angka pekerja anak melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan keluarga

Rencana Aksi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
Peningkatan ekonomi keluarga	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN												
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian												
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)			1	58.574.961,5	1	61.503.709,58	1	64.578.895,06	1	67.807.839,81	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN												
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota												
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)			50	79.150.000	50	79.150.000	50	79.150.000	50	79.150.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	30	40.249.539,17	30	40.249.539,17	30	42.262.016,14	35	44.375.116,93	35	46.593.872,78	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	30	140.873.387,09	30	140.873.387,09	40	147.917.056,44	45	155.312.909,27	50	163.078.554,73	
		50	80.499.078,34	50	80.499.078,34	50	84.524.032,25	50	88.750.233,87	50	93.187.745,56		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													

1

	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil												
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	30	111.974.060,97	35	117.572.764,02	40	123.451.402,22	45	129.623.972,33	45	136.105.170,95	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi												
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	20	144.567.001,73	32	145.795.351,77	32	147.585.118,3	32	159.964.374,22	32	172.962.593,93	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota												
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	50	30.000.000	50	46.278.917,79	50	52.699.927,48	50	59.134.923,85	50	66.191.670,04	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												
Pemberian bantuan sosial/PKH/ Beasiswa	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												
	Fasilitasi Bantuan Sosial	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang	400	50.000.000	400	50.000.000	400	50.000.000	400	100.000.000	400	100.000.000	

1

	Kesejahteraan Keluarga	Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)											
Pengembangan pendidikan vokasional dan life skill bagi ATS	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan												
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100	525.650.000	100	525.650.000	100	525.650.000	100	525.650.000	100	525.650.000	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	30	3.135.700.500	30	3.214.093.012	30	3.294.445.337	30	3.376.806.471	30	3.461.226.633	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan (Orang)	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	40	76.000.000	40	76.000.000	40	76.000.000	40	76.000.000	40	76.000.000	
Pendataan Pekerja Anak	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK												
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	9	275.000.000	9	275.000.000	9	275.000.000	9	300.000.000	9	315.000.000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa												
	Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	1	18.232.593,75	

	Profil Desa	(Dokumen)										
--	-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 4. 2 Matrik Penanganan Ats Untuk Isu Anak Penyandang Disabilitas

Strategi 2 : Meningkatkan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas

Rencana Aksi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan SLB atau sekolah inklusif, serta layanan pendidikan alternatifnya (non formal) untuk semua anak penyandang disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan												
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	120	78.000.000	120	78.000.000	120	78.000.000	120	78.000.000	120	78.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	30	73.452.898	30	75.289.220	30	77.171.451	30	79.100.737	30	81.078.255	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial												
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	30.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000		20.000.000	100	20.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	1	150.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	

1

Memperkuat kapasitas sekolah umum yang menerapkan pendidikan inklusif untuk melayani anak penyandang disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	150	48.737.679	150	49.956.121	150	51.205.024	150	52.485.150	150	53.797.279
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	60	75.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	86	136.586.877	86	140.001.549	86	143.501.587	86	147.089.127	86	150.766.355
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	4	7.025.157.790	4	7.200.786.735	4	7.380.806.404	4	7.565.326.564	4	7.754.459.728
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	80	116.712.750	80	116.712.750	80	116.712.750	80	116.712.750	80	116.712.750
Pemberian alat bantu dan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											

bantuan pendidikan / beasiswa kepada ABK dari keluarga kurang mampu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			30	65.000.000	30	70.000.000	30	70.000.000	30	80.000.000	
Fasilitasi gedung sekolah yang aksesibel dan inklusif	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan												
	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pelatihan Berjenjang Pendidikan Inklusif kepada Tenaga Pendidik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan												
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	
Edukasi dan Pemberdayaan Orang Tua	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial												
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	
Pendataan Anak Disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial												
	Pemberian	Jumlah Orang yang	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	

1

	Layanan Data dan Pengaduan	Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)											
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 4. 3 Matrik Penanganan Ats Untuk Isu Anak Dalam Pernikahan

Strategi 3: Mencegah perkawinan anak dan memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi

Rencana Aksi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
Sosialisasi dan advokasi pencegahan perkawinan anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK												
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	3	175.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	1	109.633.260	1	115.114.924	1	120.870.671	1	126.914.206	1	133.259.917	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK												
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	

	Kabupaten/Kota	(Dokumen)											
	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	3	175.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	1	109.633.260	1	115.114.924	1	120.870.671	1	126.914.206	1	133.259.917	
Reintegrasi anak menikah ke pendidikan formal maupun informal	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)												
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												
	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	40	35.755.754	40	42.543.541,7	40	49.670.718,79	40	57.154.254,72	40	65.011.967,46	
	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	
Penguatan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												

Regulasi	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa												
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	123	43.000.000	123	45.150.000	123	47.407.500	123	49.777.875	123	52.266.768,75	

Tabel 4. 4 Matrik Penanganan Ats Untuk Isu Anak Dalam Pernikahan

Strategi 4: Meningkatkan motivasi dan minat belajar anak melalui pendidikan yang menarik dan fleksibel

Rencana Aksi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
Penguatan Tim P-ATS Koordinasi dan Sinkronisasi	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	7	300.000.000	7	330.000.000	7	399.300.000	7	439.230.000	7	483.153.000	
Advokasi dan kampanye sosial penanganan ATS	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	
	Pengembangan Kurikulum dan Digitalisasi Pendidikan		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	PKM Dosen untuk menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Sinkronisasi Program Kegiatan antara UNU dan Pemerintah Kabupaten		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Revitalisasi Satuan Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

		(Unit)											
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
	Rehabilitasi	Jumlah Ruang Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	

1

	Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)											
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5		5	250.000.000	

1

	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)								250.000.000			
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	7	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000	
Pengembangan Kegiatan Belajar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	
Pengembangan PKBM	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan												
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100	525.650.000	100	525.650.000	100	525.650.000	100	525.650.000	100	525.650.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	120	78.000.000	120	78.000.000	120	78.000.000	120	78.000.000	120	78.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	

1

	Kesetaraan	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)											
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	30	73.452.898	30	75.289.220	30	77.171.451	30	79.100.737	30	81.078.255	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	30	3.135.700.500	30	3.214.093.012	30	3.294.445.337	30	3.376.806.471	30	3.461.226.633	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Peningkatan / rehabilitasi jalan dan jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota												
	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	45	1.519.210.122	45,45	1.534.402.223,22	45,9	1.549.746.245,45	46,36	1.565.243.707,91	46,83	1.580.896.144,99	
	Rehabilitasi	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	13	1.711.247.886	13,13	1.728.360.364,	13,26	1.745.643.968,	13,39	1.763.100.4	13,53	1.780.731.412,2	

	Jembatan	(Meter)				86		51		08,19		8	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1,2	4.387.683.533	1,4	4.431.560.368,33	1,6	4.475.875.972,09	1,8	4.520.634.731,73	2	4.565.841.079,05	
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1	8.725.428.533	1,01	8.812.682.818,33	1,02	8.900.809.646,51	1,03	8.989.817.742,98	1,04	9.079.715.920,41	
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	12,9	47.308.706.418	13,03	50.410.980.973,8	13,16	53.675.737.648,8	13,29	57.111.174.233	13,42	60.725.899.144	
Pembangunan dermaga	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN												
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau												
	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)	15	1.092.744.577,52	5	1.633.381.806,39	5	1.316.050.896,71	5	1.876.103.441,55	5	2.038.908.613,62	
Verifikasi dan Validasi Data BPB													
Mendorong santri pondok pesantren mengikuti pendidikan kesetaraan													
Mendorong Pondok Pesantren mengurus perizinan													

1

Tabel 4. 5 Matrik Penanganan Ats Untuk Isu Kelompok Ats Lainnya (Tidak Ada Biaya)

Strategi 5: Memperluas akses pendidikan melalui jaminan pembiayaan sekolah

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-ATS) Kabupaten Kubu Raya ini telah menguraikan kondisi umum pendidikan di Kabupaten Kubu Raya beserta tantangan yang dihadapi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kubu Raya berada pada kategori tinggi dan terus meningkat setiap tahun, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan dan permasalahan serius, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kubu Raya masih relatif rendah masih berada dibawah capaian nasional dan Provinsi Kalimantan Barat, menandakan banyak anak putus sekolah sebelum menuntaskan pendidikan 12 tahun. Keterbatasan akses sarana prasarana di beberapa wilayah, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta faktor geografis turut mewarnai kondisi pendidikan di Kubu Raya secara keseluruhan.

Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Kubu Raya telah diidentifikasi secara mendalam dalam dokumen ini. Hasil analisis situasi menunjukkan bahwa jumlah anak yang tidak bersekolah masih mencapai 8.435, tersebar di setiap kecamatan. Anak-anak ini mencakup berbagai kategori, mulai dari anak putus sekolah (DO), lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan (LTM), hingga anak yang belum pernah bersekolah sama sekali (BPB). Berbagai faktor penyebab ATS telah diurai, di antaranya faktor ekonomi yang mendorong anak untuk bekerja, kurangnya motivasi atau keinginan anak untuk bersekolah, pernikahan usia anak yang mengakibatkan anak terutama perempuan putus sekolah, serta anggapan sebagian keluarga bahwa pendidikan formal dirasa sudah cukup pada tingkat tertentu. Selain itu, kondisi khusus seperti anak penyandang disabilitas juga diakui menjadi tantangan dalam memastikan setiap anak dapat bersekolah. Analisis situasi ini menegaskan bahwa permasalahan ATS bersifat multidimensi dan mendesak, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terarah, dan kolaboratif.

Strategi dan rencana aksi daerah yang telah disusun dalam RAD-ATS Kubu Raya merupakan respon konkrit terhadap situasi tersebut. Seluruh strategi dirumuskan sejalan dengan kerangka Strategi Nasional Penanganan ATS (Stranas P-ATS) serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Dua pendekatan utama yang diutamakan ialah strategi intervensi dan strategi pencegahan. Strategi intervensi berfokus pada upaya menjangkau dan mengembalikan anak-anak yang saat ini berada di luar sekolah ke dalam layanan pendidikan atau pelatihan yang relevan. Melalui program pendampingan, anak-anak ATS didorong untuk melanjutkan pendidikan mereka baik di sekolah formal, pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maupun pelatihan keterampilan vokasional. Di sisi lain, strategi pencegahan difokuskan untuk memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah di kemudian hari. Langkah

pencegahan ini mencakup penguatan mekanisme peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran agar anak betah bersekolah, pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta perbaikan akses pendidikan (misalnya melalui pendirian unit sekolah baru atau transportasi sekolah) khususnya di wilayah yang selama ini underserved. Seluruh rencana aksi yang tertuang dalam dokumen ini telah melalui proses deseminasi dan koordinasi lintas sektor, sehingga diharapkan dapat diimplementasikan secara realistis dan berkelanjutan. Kebijakan dan program prioritas yang diidentifikasi juga dirancang untuk diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2026–2030.

Secara keseluruhan, urgensi penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kubu Raya perlu penanganan serius. Setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan minimal hingga tamat jenjang menengah atas sesuai amanat Wajib Belajar 12 Tahun dan berbagai regulasi lainnya. Menurunkan angka ATS bukan semata-mata memenuhi target statistika pendidikan, tetapi terutama untuk memastikan pemenuhan hak dasar anak dan mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Anak-anak yang tidak bersekolah berisiko menghadapi masa depan suram, terjatuh kemiskinan, terpapar eksploitasi maupun masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, arah kebijakan penanganan ATS ke depan telah ditetapkan secara jelas melalui RAD ini: mewujudkan Kubu Raya bebas Anak Tidak Sekolah dengan cara-cara yang terstruktur, inklusif, dan berkeadilan. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan ATS sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia Kubu Raya. Indikator-indikator kinerja terkait ATS akan dijadikan acuan evaluasi, sehingga kemajuan pelaksanaan RAD-ATS dapat terukur dan akuntabel. Jika seluruh program dan kebijakan dalam rencana aksi ini dijalankan dengan konsisten, diharapkan angka ATS di Kubu Raya dapat ditekan signifikan dari tahun ke tahun, mendekati nol pada akhir periode perencanaan.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi RAD-ATS Kabupaten Kubu Raya sangat bergantung pada dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, harus bersinergi memastikan kebijakan yang telah disusun benar-benar terlaksana di lapangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta instansi terkait perlu berkolaborasi dengan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan non-formal, serta sektor swasta dan dunia usaha dalam menyediakan akses pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak yang membutuhkan. Keterlibatan orang tua, keluarga, dan masyarakat luas juga sangat krusial dalam mendorong anak-anak kembali bersekolah dan mencegah mereka putus sekolah. Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, Kabupaten Kubu Raya dapat mengatasi permasalahan anak tidak sekolah secara tuntas. Harapannya, dokumen RAD-ATS ini tidak hanya menjadi rencana di atas kertas, tetapi menjadi panduan aksi nyata bagi semua pihak. Melalui upaya bersama yang konsisten, kita optimis bahwa setiap anak di Kabupaten Kubu Raya akan memperoleh pendidikan yang layak dan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih

baik, sehingga cita-cita menjadikan sumber daya manusia Kubu Raya yang unggul, cerdas, dan berdaya saing tinggi dapat terwujud.

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

1